Prof. Dr. H. Syaifuddin, M.Ag.



Laporan Hasil Penelitian

MODERNISASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA REVOLUSI (1945-1949) DI DAERAH BANJAR

(Gagasan Modernisasi Pendidikan Islam Model ”SMIP-1946”)

MODERNISASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA REVOLUSI (1945-1949) DI DAERAH BANJAR (Gagasan Modernisasi Pendidikan Islam Model "SMIP-1946")

Oleh

Prof. Dr. Syaifuddin, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022

KATA PENGANTAR

Salah satu dari filosofi keilmuan UIN Antasari Banjarmasin dalam upaya mencapai visi "Unggul dan Berakhlak" ialah "Berbasis Lokal", yakni: melakukan kajian keilmuan yang berdasarkan pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial di masyarakat Banjar secara regional; dan berbasis pada nilai kearifan lokal (*local wisdom*), yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Selain itu, kajian ini juga didasari oleh sebuah sikap dan pemahaman yang tumbuh dalam masyarakat umat Islam, yakni *al-muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah*, yakni 'Memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik."

Berdasarkan filosofi keilmuan UIN Antasari dan paradigma keilmuan dan kehidupan umat muslim tersebut penelitian dilakukan., yakni dengan mengkaji khazanah pemikiran modern pendidikan Islam para ulama dan guru agama pada era revolusi di Daerah Banjar atau Kalimantan Selatan.

Dalam kajian ini disamping mencoba untuk menggali berbagai gagasan pemikiran tentang modernisasi pendidikan Islam model "SMIP-1946" juga mencoba untuk melihat: apa yang melatarbelakangi lahirnya gagasan modernisaasi tersebut, para ulama dan guru guru agama yang terlibat pada lahirnya gagasan modernisasi pendidikan Islam di daerah Banjar tersebut, serta konstruksi teoritik apa yang dapat diambil untuk pengembangan pendidikan Islam pada masa kini dan masa yang akan dating.

Semoga dengan adaanya kajian ini dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya terkait dengan pemikiran dan gagasan pengembangan pendidikan Islam di era revolusi di Daerah Banjar, yang dalam kenyataannya masih sangat kurang mendapat perhatian.

Banjarmasin, 01 Juli 2022

Peneliti

Prof. Dr. Syaifuddin, M.Ag.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Bab I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Penelitian ……..	1
	B. Fokus Penelitian ……	8
	C. Tujuan Penelitian ……...	9
	D. Perspektif Teoritik dan Histografis ……...	9
	E. Metode Penelitian ……..	15
Bab II	lATAR BELAKANG LAHIRNYA “SMIP-1946”	20
	A. Motivasi Ibadah Kepada Allah dan Pengabdian Kepada Masyarakat …….	20
	B. Semangat Perjuangan untuk Merdeka ……...	21
	C. Semangat Mengisi Kemerdekaan Melalui Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa …….……..	24
Bab III	PROFIL ULAMA PENDIRI SMIP-1946 ……	39
Bab IV	GAGASAN PENDIDIKAN ISLAM MODEL SMIP-1946 BANJARMASIN ……	46
	A. Bentuk Pendidikan SMIP-1946 (Masa awal Pendiriannya) …….	46
	B. Gagasan Tentang Visi, Misi, Tujuan SMIP-1946 …….	52
	C. Gagasan Muatan Kurikulum “SMIP-1946” ……...	55
Bab V	PENUTUP ……	62
	A. Simpulan …….	62
	B. Refleksi ……...	54
Daftar Pustaka ……		65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Modernisasi pendidikan Islam di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20, yang umumnya diprakarsasi oleh para ulama yang pernah menuntut ilmu di Mekkah, Madinah, dan Mesir, yang pernah berkenalan dan melakukan dialog secara intensif dengan pemikiran modern pendidikan Islam yang terjadi di Timur Tengah dan Mesir.[1] Muhammad Yunus mengemukakan bahwa modernisasi pendidikan Islam di Indonesia pertama kali dimulai dengan berdirinya `*Adabiyah School*` pada tahun 1909, yang didirikan oleh seorang ulama yang bernama Haji Abdullah Ahmad (1878-1933). Beliau adalah merupakan sosok ulama modernis yang pernah mengenyam pendidikan Belanda di Padang dan juga sebagai murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ketika belajar di Mekkah. *Adabiyah School* adalah lembaga pendidikan Islam yang menerapkan system kelas, memakai bangku, meja dan papan tulis, mengkombinasikan mata pelajaran agama dan umum, menggunakan metode dan proses pembelajaran seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah Belanda.[2] Akan tetapi, setelah enam tahun berdiri berubah menjadi `*HIS Adabiyah*`, karena ingin menerima subsidi dari pemerintah Belanda, sehingga harus mempraktikkan model sekolah Belanda. Hal itu menyebakan kesempatan modernisasi pendidikan agama sebagaimana ide `*adabiyah School*` semula telah hilang, karena pendidikan agama hanya menjadi suplimen dari pendidikan umum.[3]

Kehadiran modernisasi pendidikan Islam model `*Adabiyah School*` tersebut itu berhasil memberikan motivasi dan semangat bagi para ulama lainnya untuk melakukan pembaruan pendidikan Islam di tempatnya masing-masing, kususnya di Sumatera Barat.[4] Setelahnya berdiri beberapa lembaga pendidikan Islam modern lainnya,

---

[1]Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20*, ke I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). p. 6-7.

[2]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992). P. 63.

[3]Karel A Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah (Pendidikan Islam Dan Kurun Moderen)* (Jakarta: LP3ES, 1991). P. 41.

[4]Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20*. p. 6-7.

seperti: (1) `*Madras School*` tahun 2010 oleh Syeck M. Umar Thaib di Batusangkar; (2) `*Diniyah School*` tahun 1915 oleh Zainuddin Labai al-Yunusi di Batu Sangkar; (3) `*Al Madrasatuddiniyah*` yang merupakan madrasah khsus puteri yang disebut juga `Diniyah Puteri` tahun 1923 oleh Rahmah al-Yunusi di Padang Panjang; dan (4) `*Sumatera Thawalib*` pasca bergabungnya Haji Abdul Karim Amrullah pada tahun 2015 di Minangkabau.[5]

Modernisasi pendidikan Islam di Jawa, jika dilhat dari tahun beridrinya, sebenarnya dapat dinyatakan terjadi lebih awal, namun kiprah ulama dalam pembaharuan di Jawa lebih didominasi oleh para ulama yang tergabung dalam sebuah organisasi. Medernisasi pedidikan Islam yang pertama kali ada di Pulau Jawa dimulai dengan berdirinya lembaga pendidikan Islam moderen yang dipelopori oleh organisasi *Jamiah al Khairiyah* pada tahun 1901 di Jakarta. Salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi ini ialah mengembangkan pendidikan Islam moderen dalam bentuk madrasah. Lembaga pendidikan Islam ini mengimplementasikan sistem pendidikan modern dalam bentuk klasikal, penggunaan buku-buku teks, mengajarkan mata pelajaran non Islam, seperti Berhitung, Sejarah, Geografi, dan Bahasa Inggris.[6]

Selanjutnya modernisasi pendidikan Islam lebih banyak dilakukan oleh para ulama yang bergabung dalam sebuah organisasi, di antaranya: Sarekat Islam (SI) yang didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1912,[7] mereka melakukan kiprahnya dalam membangun pendidikan Islam modern, utamanya ketika berada diperiode kedu 1916-1921, yang dimulai pada periode kedua 1916 sampai 1921 yang dapat dikatakan merupakan periode puncak.[8] KH Akhmad Dahlan dengan organisasi Muhammadiyahnya mendirikan lembaga pendidikan Islam moderen mulai tahun 1912,[9] yang mengembangkan model pendidikan yang menggabungkan model pendidikan ala Belanda dengan Islam yang diistilahkan dengan "*HIS met de Qur`an*".[10] Di samping itu Muhammadiyah juga

[5]Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. p. 63.

[6]Natalie Mobini-kesheh and East Indies, "The Arab Periodicals of the Netherlands," *Bijdragen* 152 (1996): 236–56.

[7] D.G Stibbe, J. Stroomberg, and D.G Stibbe, "Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie" (s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1932).

[8] Deliar Noor, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*, ed. 8 (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996)., p. 115.

[9]Deliar Noor. Bab. 11.

[10]Alfian, *Muhammadiyah : The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, n.d.). p. 229

mengembangkan pendidikan Islam dalam bentuk madrasah.[11] Di Kalangan Nahdatul `Ulama (NU), yang lahir tahun 1920, di samping tetap menjalankan pendidikan Islam yang dijalankan secara tradisonal, juga melakukan modernisasi pendidikannya. Menurut Zamakhsari Dhofier, pesantren NU pertama yang melakukan modernisasi pendidikannya ialah Pesantren Tebuireng[12], yang berdiri sejak tahun 1899 oleh KH Hasyim Asy`ari, yang kemudian melakukan modernisasi pada tahun 1916, yakni dengan memasukkan sistem madrasah dan memasukan mata pelajaran umum, seperti: Bahasa Indonesia (Melayu), Bahasa Belanda, Sejarah, Ilmu Berhitung, Ilmu Bumi, dan penulisan huruf latin.[13] Para ulama yang tergabung dalam Persis, yang lahir tahun 1923 di Bandung, sebagai kelompok diskusi kegamaan yang sangat konsern dengan ide-ide pembaharuan Islam yang bersumber dari jurnal-jurnal reformis seperti al-Manar (Kairo) dan al-Munir (Padang), juga telah mendirikan lembaga pendidikan Islam modern.[14]

Modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan oleh para ulama yang tergabung dalam berbagai organisasi di Jawa tersebut selanjutnya menyebar pula ke berbagai wilayah di luar pulau Jawa, baik oleh oragnisasi yang telah berkembang di Pulau Jawa tersebut, seperti Al- Jamatul Khair, NU, Muhammadiyah, Persis, maupun oleh para ulama yang tergabung dalam organisasi lokal di pulau masing-masing di Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Kalimantan.

[11]Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah*, (Jakarta; Dharma Bhakti, 1983), h. 15).

[12]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia.* (Jakarta: Pustaka LP3ES., 2011).

[13]Salahuddin Wahid, *Transformasi Pesantren Teboireng, Menjaga Tradisi DinTengah Tantangan*, 1st ed. (Malang: UIN Maliki Press, 2011). p. 41. 103

[14]Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978).



Di Kalimantan Selatan (waktu itu disebut Daerah Bandjar)[15] juga telah terjadi upaya modernisasi pendidikan Islam, yang juga berlangsung sejak awal abad ke-20. Modernisasi pendidikan Islam tersebut juga dilakukan oleh para ulama, baik secara perorangan maupun organisasi. Secara historis dapat dicatat sebagai berikut:

(1) Modernisasi pendidikan Islam oleh orang-orang Arab yang tergabung dalam organisasi *Musaadatul Ikhwan* yang bermukim di Banjarmasin dengan mendirikan *Madrasah Diniyah al-Khairiyah al Islamiyah* yang beralamat di Jalan Sulawesi Banjarmasin pada tahun 1903. Pendidikan Islam ini dimulai dalam

[15]Sebelum Kalimantan bergabung dengan Republik Indonesia tanggal 29 Desember 1949 (ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyerahkan Daerah Kalimantan yang meliputi: 1. Daerah Banjar. 2. Daerah Dayak Besar. 3. Daerah Federasi Kalimantan Tenggara. 4. Daerah Federasi Kalimantan Timur, dan 5. Daerah Federasi Kalimantan Barat. Daerah Banjar pada waktu itu terdiri dari seluruh daerah yang ada di Kalimantan selatan Selatan sekarang minus Tanah Laut, Tanah bumbu, dan Kota Baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 sebagian besar daerah sebelah barat dan utara dipisahkan dan berdiri sendiri sebagai Propinsi Kalimantan Tengah. Sedang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 memisahkan bagian utara dari daerah Kabupaten Kotabaru dan memasukkan wilayah itu ke dalam kekuasaan Propinsi Kalimantan Timur. M. Idwar Saleh, dkk, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*; Sutrisno Kutoyo, *Penelitian Sejarah Dan Budaya, Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.* (Banjarmasin: Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Selatan., 1978).

bentuk halakah (kaji duduk) yang kemudian dimodernisasi pada 1910 dengan menerapkan sistem sekolah dan mengajarkan sedikit pengetahuan umum yang diajarkan dengan menggunakan bahasa Arab;[16]

(2) Modernisasi pendidikan Islam oleh organisasi Syarikat Islam (SI) dilakukan oleh Tuan Guru Haji Jamaluddin yang merupakan pengurus SI, yakni dengan mendirikan *Madrasah al-Imad fi Ta'lim al-Awlad* yang menerapkan sistem sekolah pada tanggal 14 Juli 1914 di Martapura, yang selanjutnya dikenal dengan Madrasah Darussalam hingga sekarang;[17]

(3) Modernisasi pendidikan Islam oleh organisasi Muhammadiyah dilakukan sejak kehadiran organisasi ini di Alabio tahun 1922, yakni dengan mendirikan sejumlah lembaga pendidikan Islam yang moderen dengan nama *Standart School* yang kemudian berubah nama menjadi *Vervolgschool met den Qur`an* dan kemudian dilanjutkan dengan pendirian sekolah tingkat lanjutannya, yaitu *Wostha School* di tahun 1928[18]. Selain itu, Muhammadiyah juga mendirikan HIS Muhammadiyah di Jalan Kalimantan dan di Jalan Pasar Lama Banjarmasin) yang berdiri tahun 1935;[19]

(4) Modernisasi pendidikan Islam oleh Tuan Guru Haji Abdul Rasyid di Amuntai dimulai tahun 1928 dengan nama "*Arabisch School* (Sekolah Arab)", yang selanjutnya diikuti pendiriannya oleh murid-murid beliau di berbagai tempat.[20]

(5) Modernisasi pendidikan Islam oleh Organisasi *Musyawaratutthalibin* yang berdiri sejak tahun 1931 dengan mendirikan sejumlah madrasah, baik tingkat *ula* maupun *wostha*, yang tersebar bukan saja di Daerah Banjar dan di daerah luar Daerah Banjar yang terdapat cabang *Musyawaratuthalibin* dengan mengambil

[16]Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*, ed. Ramli Nawawi (Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1992). p. 86-89.

[17]Tim Penulis, *Satu Abad Pondok Pesantren Darussalam*, (Martapura: ttp, 2014), h. 53.

[18]*Standart School*/*Vervolgschool met den Qur`an* dan *Wostha School* adalah sekolah setingkat madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah dengan mata pelajaran agama sebagai dasar dan ditambah dengan pengetahuan umum. Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*. p. 58.

[19]Wajidi, *Nasionalisme Indonesia Di Kalimantan Selatan 1901-1942* (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2007). p. 134.

[20]M. Ali Sibram Malisi, "Modernization of Islamic Education in South Kalimantan (Socio-Historical Perspective of Normal Islam Amuntai)," *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research* 2, no. 1 (2017): 43–66, https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v2i1.1051. p. 10.

nama madrasah dan lainnya, bukan saja di Daerah Banjar tetapi menyebar di berbagai cabang *Musyawaratuthalibin*.[21]

(6) Modernisasi pendidikan Islam oleh H. Mukhtar dan H. Muhammad As'ad yang tergabung dalam organisasi Persatuan Perguruan Islam (PPI) mendirikan beberapa buah Madrasah dengan sistem sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;[22]

Modernisasi dan pendirian pendidikan Islam modern tersebut terhenti ketika Jepang berkuasa, bahkan banyak lembaga pendidikan Islam yang terpaksa bubar, karena semua kegiatan pendidikan dikendalikan dan dikontrol oleh Pemerintah pendudukan Jepang, sejalan dengan pelarangan aktivitas organisasi-organisasi Islam yang merupakan penggerak modernisasi pendidikan Islam tersebut.[23] Pada sekolah-sekolah tidak diperkenankan memberikan pelajaran Agama Islam. Murid-murid sekolah hanya diizinkan untuk mendapatkan pelajaran Agama Islam yang diberikan di luar sekolah, seperti yang diberikan oleh para ulama dengan sistem pembelajaran tradisional.[24]

Modernisasi dan pendirian lembaga pendidikan Islam di Daerah Banjar baru ada kembali ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya atau yang sering disebut dengan era revolusi (1945-1949).[25] Itupun jumlahnya sangat sedikit, bahkan satu-satunya yang pernah tercatat dan masih eksis sampai sekarang ialah berdirinya lembaga pendidikan Islam modern yang diberi nama "Sekolah Menengah Islam Pertama" yang kemudian diberi nama SMIP-1946, yang berdiri pada tanggal 15 Oktober 1946 M./20 Dzul Qa`dah 1365 H di Banjarmasin.[26]

---

[21]M.Nur Maksum, "Musyawaratutthalibin , Organisasi Islam Lokal Terbesar Di Kalimantan Selatan," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2010): 203–28.

[22]LP2M UIN Antasari dan MUI Propinsi Kalimantan Selatan Tim, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa*, ed. Dkk. Dr. Wardani, *Antasari Press*, III (Banjarmasin: Antasari Press, 2018). p. 130-134.

[23]Idwar Saleh, dkk, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*., p. 94.

[24]Idwar Saleh, dkk., p. 101.

[25]Kevin W. Fogg menyebut era tahun 1945-1949 ini dengan "revolusi Indonesia", yaitu era perjuangan bangsa Indonesia untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 yang ditolak oleh Belanda dan upaya kembalinya Belanda yang didukung oleh sekutunya mengusai Indonesia. Kevin W. Fogg, *Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia*, I (Jakarta: Noura Books PT Mizan Publika, 2020)., p. 20.

[26]Sekolah ini pada awalnya diberi nama SMIP saja, kemudian ketika didirikan pula SMIP lain di Banjarmasin, Namanya menjadi SMIP I Sungai Jingah. Selanjutnya pada ulang tahun SMIP ke 37 dikukuhkan namanya menjadi SMIP-1946. Tim Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946* (Banjarmasin: Panitia HUT "SMIP-1946" Ke-50, 1996)., p. 4 dan 18.

Sehubungan dengan hal itu, maka kajian terhadap berdirinya lembaga pendidikan Islam model SMIP-1946 yang lahir pada era revolusi ini sangat menarik dan penting untuk dilakukan. Setidaknya ada lima alasan pokok yang menjadikan kajian ini dianggap penting:

Pertama, Kajian terhadap lembaga pendidikan Islam moderen yang lahir pada masa revolusi atau pada masa upaya pendudukan kembali Pemerintah Kolonial Belanda melalui *Nederlandsch Indische Civiele Administratie* (NICA)[27] di Kalimantan (1945-1949), dimana pada masa itu rakyat Daerah Banjar melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaannya, baik melalui perjuangan bersenjata maupun melalui perjuangan politik atau memalui jalur perjuangan fisik dan pemikiran yang banyak sekali melibatkan umat Islam.[28] Hal itu sebagaimana disebut oleh Kevin W. Fogg revolusi Indonesia ini dengan "revolusi Islam Indonesia", yaitu perjuangan melawan kembalinya kekuasaan Belanda yang dipandang sebagai perang kemerdekaan kaum santri untuk tujuan-tujuan Islam dan diorganisir dengan cara-cara Islam;[29]

Kedua, kajian secara khusus terhadap kehadiran modernisasi pendidikan Islam model SMIP-1946, sebagai sebuah bentuk modernisasi lembaga pendidikan Islam di Daerah Banjar masih sangat minim dan bahkan di beberapa kajian sejarah juga seperti tidak menyenntuhnya, seperti pada buku hasil penelitian ditulis oleh Ramli Nawawi, dkk dengan judul "Sejarah Pendidikan daerah Kalimantan Selatan", Idwar Saleh, dkk dalam Sejarah Daerah Kalimantan Selatan. Kajian yang pernah ada hanya dalam bentuk beberapa skripsi mahasiswa yang tidak begitu dalam;

Ketiga, kajian terhadap latar belakang pemikiran dan model gagasan modernisasi lembaga pendidikan Islam yang mengambil bentuk sekolah dengan muatan inti seimbang antara pengetahuan umum dan agama 50% pelajaran agama dan 50% pelajaran umum), yang digagas oleh para ulama di tengah masyarakat Banjar, yang saat itu masih kental dengan pentingnya pendidikan agama atau memandang

[27]Pada tanggal 17 September 1945 mendaratlah tentara Australia atas nama Sekutu, di Banjarmasin. Bersamaan dengan tentara Australia ini turutlah sejumlah orang-orang Belanda yang tergabung dalarn suatu organisasi yang bernarn2 Nica (*Netherland Indie Civil Administration*), Pemimpinnya adalah Mayor A. L. van Assendrop. NICA inilah yang mewakili Pemerintah Kolonial Belanda yang berupaya untuk menguasai Kalimantan. Idwar Saleh dkk, menyebut masa revolusi dengan masa., Idwar, dkk., *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*., p. 112.

[28]Idwar. p. 109-124.

[29]Fogg, *Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia*., p. 21.

pengetahuan agamalah yang lebih penting daripada pengetahuan umum, juga menjadi alasan penting untuk mengkaji gagasan pendirian lembaga pendidikan Islam model SMIP-1946 ini;

Keempat, Pendirian SMIP-1946 ini melibatkan sejumlah ulama yang beragam sebagai penggagas utamanya, utamnya yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Sekolah Islam (PGSI) dan sejumlah tokoh masyarakat Banjar yang memiliki latar belakang organisasi keagamaan dan propesi yang beragam, seperti eks aktivis Musyawaratuthalibin (H. Muhammad Hanafie Gobit), SERMI (Khatib Syarbaini Yasir), H. Hasan Mugeni Marwan (Pengurus NU). Haji Muhamad Yasin Amin dan H.M. Hasan Baseri (Muhammadiyah).

Kelima, model lembaga pendidikan Islam yang digagas dengan model SMIP-1946 ini sempat menjadi percontohan bagi masyarakat lain dalam mendirikan model pendidikan. Tercatat sesudahnya ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang menggunakan nama yang sama yaitu SMIP, yaitu: 1) SMIP Mandingin Barabai yang beridiri tahun 1948. Akan tetapi sekolah ini tidak dapat berlangsung lama karena meningkatnya revolusi fisik, sehingga pengajian dan sekolah itu ditutup;[30] 2) SMIP II Kebun Bungan yang berdiri tahun yang didirikan tahun 1965 (Sekolah ini masih berdiri sampai sekarang, namun berubah nama menjadi M.Ts Kebun Bunga Banjarmasin)[31]; dan 3) SMIP II Pangeran Antasari yang berdiri tahun 1970 (sekolah ini masih berdiri sampai sekarang dengan mana yang sama).[32]

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana judul penelitian ini, yaitu "Modernisasi Pendidikan Islam di Era Revlolusi (1945-1949), Analisis Gagasan Pendirian Pendidikan Islam Model SMIP-1946". Dengan demikian fokus penelitian ini adalah kajian atas berbagai hal yang terkait dengan gagasan pendidikan lembaga pendidikan Islam model SMIP-1946, sebagai sebuah model modernisasi pendidikan Islam yang berdiri di era revolusi. Kajian terhadap gagasan tersebut didasarkan pada gagasan modernisasi pedidikan

[30]Tim, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa*., p. 167.
[31]Dokumen MTs Kebun Bungan Banjarmasin.
[32]Wawancara dengan Pimpinan dan Pengelola SMIP III Pangeran Antasari, tanggal 25 Juni 1922.

yang terdapat dalam pada kondisi SMIP-1946 mulai sejak berdirinya hingga tahun 1949. Dengan demikian kajian ini tidak membahas gagasan modernisasi pendidikan yang terjadi ketika SMIP-1946 mengalami perkembangan selanjutnya sejak tahun 1950 sampau sekarang.

Kajian tersebut meliputi: 1) Latar belakang lahirnya gagasan pendirian lembaga pendidikan Islam model SMIP-1946 tersebut; 2) Profil ulama penggagas pendirian lembaga pendidikan modern model SMIP-1946; 3) Gamabaran tentang gagasan yang terdapat dalam modernisasi pendidikan Islam model SMIP-1946 tersebut pada saat berdirinya, baik terkait dengan gagasan tentang visi dan misi SMIP-1946, Tujuan SMIP-1946, Materi kurikulum dan pembeljaran SMIP-1946; 4) Konstruksi teororitik dari gagasan pendirian pendidik Islam modern model SMIP-1946.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan deskripsi latar belakang pendirian lembaga pendidikan Islam model SMIP-1946 sebagai sebuah modernisasi pendidikan Islam.
2. Mendeskripsikan profil ulama yang menjadi penggagas pendirian sekolah menengah Islam Model “SMIP-1946 dan keterkaitannya dengan gagasan lahirnya modernisassi pendidikan Islam model SMIP-1946.
3. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan sejumlah gagasan modernisasi pendirian lembaga pendidikan Islam Model “SMIP-1946.
4. Melakukan konstruksi teoritik atas gagasan modernisasi pendidikan Islam Model “SMIP-1946.

D. Perspektif Teoritik dan Histografis.

1. Perspektif Teoritik

Istilah modern atau moderdnisasi mempunyai berbagai arti dan maksud. Istilah modern ini digunakan tidak hanya untuk orang-orang, tetapi juga untuk bangsa, sistem politik, ekonomi, lembaga seperti lembaga pendidikan dll. Pada umumnya kata modern digunakan untuk menunjukkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju dalam arti lebih menyenangkan, lebih meningkatkan kesejahteraan

hidup.[33] Menurut Harun Nasution, istilah modern, modernisasi dan modernisme sejatinya adalah istilah yang semula dipakai dalam masyakarat Barat yang mengandung arti fikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, adat-adat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.[34] Ketika pikiran dan aliran modernisme ini mamasuki wilayah agama di Barat, maka terjadilah pergumulan antara ajaran-ajaran agama Katolik dan Protestan dengan ilmu pengetahuan dan falsafat modern. Aliran ini akhirnya membawa kepada timbulnya sekularisme di masyarakat Barat. Adapun ketika ilmun pengetahuan dan teknologi modern Barat memasuki dunia Islam, muncul pemikiran dan gerakan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tersebut, yang melahirkan pemikiran modern di dalam Islam.[35] Upaya modernisasi dalam Islam tersebut pertama kali terbuka ketika ekspedisi Napoleon dalam penaklukan Mesir dengan menyertakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Barat. Kemajuan Barat itulah yang menginsafkan dunia Islam akan kelemahan di dunia Islam saat itu di bandingkan Barat. Untuk itu para penguasa dan pemuka-pemuka Islam mulai berfikir dan mencari jalan untuk mengembalikan *balance of power,* yang telah pincang dan membahayakan Islam. Dari situlah timbulnya apa yang disebut pemikiran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam.[36]

Upaya modernisasi dalam Islam yang pertama kali dilakukan adalah melalui dunia pendidikan, yakni dengan melakukan pembaharuan pendidikan Islam yang dianggap telah ketinggalan dari pendidikan Barat. Modernisasi ini pertama kali dimotori oleh Muhammad Ali sebagai penguasa (Pasya) di Mesir. Ia sangat tertarik dengan unsur-unsur baru dari Barat yang dibawa dalam ekspedisi Napoleon tersebut.

---

[33]Ibrahim, *Inovasi Pendidikan (Pengantar Untuk Mmemahami Apa Dan Bagaimana Difusi Dan Implementasi Inovasi Pendidikan)* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1988)., p. 42.

[34]Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, cetakan 9 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)., p. 11.

[35]Nasution., p. 11-12.

[36]Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya.* (Jakarta: Indonesia Press, Jilid I, 1985)., p. 88-89.

Untuk itu yang pertama sekali dilakukannya ialah mendirikan "Kementerian Pendidikan" yang dapat membantunya mewujudkan pembaharuan di bidang pendidikan dan lainnya. Melalui kementerian pendidikan ini Ia membuat program pendirian sekolah-sekolah model Barat, mendatangkan guru dari Barat, mengirim pelajar ke Italia, Prancis, Inggeris dan Austria, dan melakukan gerakan penterjemahan buku-buku Barat.[37]

Modernisasi pendidikan Islam di Indonesia sejatinya tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh modernisasi pendidikan Barat (baca model pendidikan Belanda) tetapi lebih banyak dipengaruhi dan diprakarsai oleh para pelajar (ulama) yang pernah menuntut ilmu di Mekkah, Madinah, dan Mesir, yang telah perkenalan dan melakukan dialog intensif dengan pemikiran modern dalam Islam yang telah terjadi di Timur Tengah dan Mesir, pada awal abad ke-20.[38] Dengan kata lain modernisasi yang dilakukan dalam pendidikan Islam di Indonesia terdapat unsur-unsur modernisasi yang diadopsi dari pemikiran modern Islam yang pernah ada sebelum kemajuan pendidikan Barat, yakni model pendidikan yang pernah dilakukan ketika masa kemajuan Islam di era klasik. Hal itulah yang disebut *tajdid*, yang oleh Yusuf Qardhawi diartikan sebagai Sedangkan menurut Yusuf Qurdhawi6 tajdid diartikan "pembaruan atau modernisasi" yakni upaya mengembalikan pemahaman agama kepada kondisi semula sebagaimana masa nabi, namun bukan berarti harus persis seperti terjadi waktu itu, melainkan melahirkan keputusan danpraktik yang sejalan dengan maksud syar'i dengan membersihkan dari unsur-unsur bid'ah, khufarat atau pikiran-pikiran asing.[39] Selin itu, modernisasi yang menjadi rujukan para ulama juga apa yang pernah dikonsepkan dan dipraktikkan pada masa kemajuan peradaban Islam, Sebagaimana ditulis oleh Mehdi Nakosten, bahwa pada masa kemajuan peradaban Islam tersebut, khususnya pada masa pemerintahan al-Ma`mun (813-833 M), lembaga-lembaga pendidikan Islam telah memiliki kurikulum yang memuat sejumlah ilmu pengetahuan atau mengajarkan: Matematika (Aljabar, Trigometri dan Geometri); Sains (Kimia, Fisika dan Astronomi); Ilmu Kedokteran (Anatomi, Pembedahan, Farmasi, dan cabang-cabang ilmu kedoketaran khusus); Filasafat (Logika, Etika dan Metafisika); Kesusastraan (Filologi, Tata Bahasa, Puisi dan Ilmu Persajakan) ilmu-ilmu sosial (Sejarah, Geografi, disiplin-disiplin yang berhubungan dengan

[37]Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*., p. 34-41.

[38]Arif Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20*., p. 6-7.

[39]Yusuf Qardhawi, *Dasar Pemikiran Hukum Islam: Taqlid Ijtihad* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)., p. 96.

politik, Hukum, Sosiologi, Psikologi dan Jurisprudensi (Fikih), Teologi (Perban-dingan Agama, Sejarah Agama, Studi al-Quran, tradisi religius (Hadis) dan topik-topik religius lainnya).[40]

Sama halnya dengan modernisasi pendidikan Islam yang terjadi di Derah Banjar, tentu tidak sepenuhnya dipengaruhi dan mengadopsi modernisasi pendidikan yang ada pada lembaga pendidikan Barat)baca pemerintah Kolonnial Belanda), tetapi juga banyak dipengaruhi langsung oleh modernisasi yang terjadi di Timur Tengah dan Mesir yang dibawa oleh para ulama yang pernah belajar di sana, juga modernisasi yang telah dilakukan oleh modernisasi pendidikan Islam yang telah dilakukan di daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Barat dan Jawa yang terlebih dahulu melakukan pembaharuan pendidikannya. Pemikiran dan pendapat para ulama juga merupakan salah satu bagian yang sangat menentukan model modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan, yang tidak selalu mengekor pada pendapat orang lain. Hal itu dikarenakaan peran ulama yang sangat kuat di masyarakat. Ulama atau Kyai dalam masyarakat berperan sebagai tokoh agama yang meliputi peran spiritual, pendidikan, *agent of change*, dan sosial budaya serta berperan sebagai figure yang terlibat dalam politik baik sebagai partisipan, pendukung maupun aktor.[41] Kepatuhan masyarakat tradisional kepada sosok Kyai pada akhirnya akan membentuk sistem sentralistik dimana Kyai sebagai pemimpinnya, sehingga perubahan yang terjadi pada masyarakat tradisional bisa dipastikan akan sejalan atau searah dengan jalan pikirin dari Kyai itu sendiri yaitu jika Kyai menghendaki masyarakatnya statis, maka pola di masyarakat tradisional juga cenderung statis dan begitu pula sebaliknya.[42]

Hal lain yang perlu dilihat dalam upaya modernisasi ialah, bahwa modernisasi menghendaki adanya hal baru atau pembaharuan (inovasi). Inovasi, sebagaimana didefinisikan oleh Ibrahim (1988) adalah suatu ide, barang, kejadian, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik itu berupa hasil invensi maupun disekoveri. Inovasi tersebut

[40]*Nakosten, Mehdi. History of Islam Origins of Western Education A.D. 800-1350 with an Introduction to Medival Muslim Education.* (Boulder, Colorado: The University of Colorado Press, 1964)., p. 71.

[41]Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2004)., p. 96.

[42]Robby Darwis Nasution, "Kyai as a Agent of Change and Peacemaker in the Traditional Society," *Sosiohumaniora,* 19, no. 2 (2017): 182., p.183.

diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu maslah tertentu. Invensi (*invention)* adalah suatu penemuan yang benar-benar baru atau sebelumnya belum ada yang kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Sedangkan diskoveri (*discovery*) adalah suatu penemuan yang sebanrnya sudah ada tetapi belum diketahui orang. [43] Sehubungan dengan itu, modernisasi pendidikan Islam dapat saja berupa invensi atau deskoveri.

Dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, terdapat berbagai model atau pola modernisasi, yang sekurang-kurangnya dapat dikelompokkan pada enam pola, yaitu:

1) Model Madrasah yang mengadopsi sistem sekolah, namun isi pendidikan (kurikulum) serratus persen bersisi ilmu agama;
2) Model Madrasah yang disuplimen pengetahuan umum, yakni modernisasi yang mengadopsi sistem sekolah dan memberikan pelajaran umum modern di samping mata pelajaran agama, namun mata pelajaran umum hanya sebagai suplimen saja, dengan forsi sekitar 70% ilmu agama dan 30% ilmu umum;
3) Model Madrasah dualistik, yakni model madrasah yang mengadopsi sistem sekolah dan memberikan ilmu pengetahuan umum dan agama secara seimbang (50%:50%);
4) Model Madrasah yang mengadopsi sistem sekolah dan secara total memasukkan seluruh mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah umum, sehingga kurikulumnya berbanding 70% ilmu umum dan 30% ilmu agama, seperti madrasah pasca diterapkannya SKB 3 Menteri tahun 1975;
5) Model Sekolah Islam, yakni yang menerapkan secara total sistem sekolah umum dan menyajikan seluruh ilmu pengetahuan umum yang diajarkan disekolah dan ilmu pengetahuan agama yang diajarkan di madrasah (100% ilmu agama dan 100% ilmu pengetahuan umum);
6) Model Sekolah Islam, yakni yang menerapkan secara total sistem sekolah umum dan menyajikan seluruh ilmu pengetahuan umum seperti yang diajarkan di

[43]Ibrahim, *Inovasi Pendidikan (Pengantar Untuk Mmemahami Apa Dan Bagaimana Difusi Dan Implementasi Inovasi Pendidikan)*., p. 40.

sekolah yang diintegrasikan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam ke dalamnya (integrasi saintek dan imtaq).

Model modernisasi pendidikan Islam dengan berbagai pola tersebut di atas pada umumnya dimotori oleh para ulama, sesuai dengan ideologi yang mereka anut. Jawad Ridha mengelompokkan ideologi pendidikan Islam pada era keemasan tersbut dalam tiga kelompok ideologi, yaitu Religius Konservatif, Religius Rasional, Pragmatis Instrumental. Karakteristik utama ideologi religious konservatif ialah orientasi pendidikannya yang merangarh dan didominasi oleh masalah diniyah (keagamaan). Pada aliran ideologi religious rasional terlihat pada kesungguhannya dalam upaya mempertemuakan kepentingan keagamaan dan keduniwian. Adapun aliran ideologi religious pragmatis dicirikan pada upaya menjadikan pendidikan untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan kehidupan nyata.[44]

2. Perspektif Histografis

Kajian tentang sejarah pendidikan Islam pada era reformasi di Daeha Borneo dapat dinyatakan masih sangat kurang dan secara khusus yang mengkaji tentang sejarah pendidikan Islam di Daerah Banjar di era revolusi atau era NICA ada terdapat dalam buku "Sejarah Pendidikan Kalimantan Selatan" yang ditulis Ramli Nawawi, dkk. Hanya saja buku itu hanya menuliskannya kurang lebih satu halaman dalam sub bahasan Pendidikan Swasta. Tulisan itu hanya menginformasikan tentang tahun berdiri, lokasi sekolah, lama beljar dan sedikit mata pelajaran. Tulisan itu juga tidak menyingung sama sekali tentang gagasan pendiriannya.[45] Buku-buku atau haasil penelitian tentang pendidikan Islam lebih bnyak berbicara tentang catatan perkembangan pendidikan Islam di era sebelum dan sesudah penjajahan Belanda. Sepertinya perkembangan pendidikan Islam di era Revolusi (1945-199) kurang terperhatikan disebabkan oleh singkatnya era ini dan memang sejatinya tidak banyak lembaga pendidikan Islam yang baru muncul di era ini. Hal itu disebabkan perhatian ulama dan tokoh-tokoh masyarakat lebih banyak tertuju pada upaya memperjuangkan revolusi kemerdekaan Borneo (Kalimantan).

[44]Muhammad Jawwad Ridha, *Al Fikr Al Tarbawi Al-Islami Muqaddamah Fi Ushulihi Al-Ijtima'iyah Wa Al-'aqlaniyah* (T.Tp: Dar al Fikr al-Arabi, n.d.).

[45]Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*., p. 116.

Khusus untuk kajian tentang SMIP-1946 terdapat beberpa penelitian dalam bentuk skripsi. Hanya saja saying kajian-kajian yang dilakukan terkesan dangkal dan hanya seputar masalah pendididikan Islam dan manajemen SMIP-1946 yang ada sekarang. Tesis yang ditulis oleh Husna sesuai dengan judulnya: "Kontribusi Keluarga Besar KH. Hanafie Gobit dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Kota Banjarmasin (Studi Tentang Penguatan Pendidikan Agama Islam pada SMIP 1946, Pondok Pesantren Hunafaa dan STAI Al Jami Banjarmasin)," hanya membahas kontribusi salah seorang pendirinya, yaitu KH. Hanafie Gobit dalam pengembangan pendidikan Islam di Banjarmasin, tidak membahas tentang gagasan pembaharuan pendidikan Islam dalam rangka pendirian SMIP-1946 secara khusus dan mendalam.[46]

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan apa yang menjadi tema dan fokus penelitian ini, yaitu meneliti tentang gagasan modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan dalam rangka pendirian SMIP-1946 yang terjadi pada masa NICA (1945-1949), maka penelitian ini merupakan penelitian sejarah dan menggunakan metode penelitian sejarah.

Gottschalk (1975: 32) menyebut penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.[47] Sedangkan metode penelitian sejarah menurut Garraghan (1957: 33) adalah sebagai "seperangkat prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis (umumnya dalam bentuk tertulis) hasil yang dicapai".[48]

Terkait dengan itu, Helius Sjamsuddin (2007: 89) membagi langkah-langkan penelitian sejarah menjadi enam tahapan, yaitu : 1. Memilih suatu topik yang sesuai; 2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik; 3. Membuat catatan

[46]Husna, "*Kontribusi Keluarga Besar Kh. Hanafie Gobit Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam Di Kota Banjarmasin (Studi Tentang Penguatan Pendidikan Agama Islam Pada Smip 1946, Pondok Pesantren Hunafaa Dan Stai Al Jami Banjarmasin)"* (Universitas Islam Negeri Antasari Program Pasca Sarjana Prodi Pai Banjarmasin, 2020).

[47]Louis Gottschalk, *Understanding History : A Primer of Historical Method, Terjemahan Nugroho Notosusanto (Mengerti Sejarah : Pengantar Metode Sejarah)*, Second edi (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975).

[48]Gilbert Josephraghan Gar, *A Guide to Historical Method*, ed. Jean Delanglez (Michigan: he University of Michigan, 1957)., p. 33.

tentang itu apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung; 4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik sumber); 5. Menyusun hasil-hasil penelitian (catatan-catatan fakta) ke dalam suatu pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya; 6. Menyajikannya dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasinya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti sejelas mungkin.[49]

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini mlebih mengandalkan studi literatur dan studi dokumenter serta diperkuat dengan wawancara kepada pihak terkait yakni para alumni SMIP-1946. Studi literatur disini adalah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, berupa dokumen, buku-buku, jurnal baik online maupun yang berbentuk hard copy serta sumber dari internet yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini.

[49]Helius Syamsuddin, *Metodologi Sejarah*, 2nd ed. (Yogyakarta: Ombak, 2007)., p. 87.

BAB II

lATAR BELAKANG LAHIRNYA "SMIP-1946"

Dalam buku sejarah "Lima Puluh Tahun SMIP-1946 dituliskan" bahwa:

Kesadaran untuk berbangsa dan bernegara yang merdeka serta hasrat ingin lepas dari belenggu penjajahan adalah salah satu latar belakang utama yang mendukung bangkitnya semangat pengabdian yang tinggi dari para pendirinya, yang ingin mendarmabaktikan diri mereka dalam usaha perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang mereka kaitkan dengan ibadah kepada Allah SWT.[50]

Dari ungkapan tersebut setidaknya ada tiga motivasi utama yang menjadi latar belakang lahirnya gagasan pendirian SMIP-1946 ini, yaitu: 1. Motivasi ibadah kepada allah dan pengabdian kepada masyarakat yang tulus dan ikhlas; 2. Semangat perjuangan untuk kemerdekaan; 3. Semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa.

A. Motivasi Ibadah Kepada Allah dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Tulus dan Ikhlas.

Bagi para ulama dan guru agama setiap pemikiran dan tindakan atau aktivitas senantiasa tidak lepas dari upaya untuk mengabdi kepada Allah SWT . Hal itu sesuai dengan keyakinan dan pandangan hidup sebagai seorang muslim yang shaleh, yakni mengabdi kepada Allah sebagai "abdullah" dan memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai "khalifatullah".

Selain dilatarbelakangi oleh semangat pengadian atau ibadah kepada ALLAh SWT, SMIP-1946 juga didirikan sebagai pengabdian kepada masyarakat atau sebagai wahana untuk memberikan membina masyarakat, sebagaimana ditulis oleh H.M. As`ari dalam "Sejarah Singkat SMIP-1946", "tujuan didirikannya SMIP itq oleh para pendirinya dirumuskan sebagai usaha untuk menciptakan manusia muslim yang-

[50]Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*., p. 5

benar-benar dapat menjadikan dirinya sebagai hamba Allah sekaligus juga hamba masyarakat.[51]

Motivasi ibadah kepada Allah dan Pengabdian kepada masayarat ini tentu juga dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh para pendirinya dalam mengelola SMIP 1946 ini di awal berdirinya. Sebagaimana dinyatakan: hasrat untuk mendirikan SMIP-1946 terwujud berkat niat yang ikhlas serta kerjha keras para pendiri. Dengan bermodalkan uangb yang berasal dari hasil pasar amal (bazar) yang mereka adakan pada waktun itu, yang berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah) dari para dermawan dan penyumbang.[52] Selain itu, semangat pengabdian ini ditujukkan bahwa para pendiri dan sekaligus pengelola serta sebagai guru tidak digaji, sebagimana dinytakan dalam buku "Lima Puluh Tahun SMIP-1946:

> Pada waktu awal berdirinya, hamper semua pengajar SMIP lebih banyak berkorban secara sukarela atau menerima imbalan yang tidak menentu. Hal itu disebabkan karena uang SPP yang diperoleh pada saat itu lebih banyak dipergunakan untuk keperluan membeli alat-alat kantor dan jugaa;at tulis. Jika kebetulan ada kelebihannya barulah dibayarkan untuk honor guru.[53]

Di antara para pengajar yang telah membaktikan dirinya pada tahun-tahun pertama itu antara lain: 1) H.M. Hanafie Gobit, 2) H. Khatib Syarbaini Yasir, 3) Abdurrahman May, 4) Fajar Sidik, 5) A.A. Rivai, 6) Marwan Ali, 7) Kamaruddin Thalib, 8) H. Hasan Mugni Marwan, 9) H. Jailani Sahari, 10) H. Muhammad Dahlan, 11) M. Ruslan, 12) H. Abdurrahman Islamil, 13) Abu Bakar Razy, 14) As`ad, 15) Ardiansyah Ideham, 16) Abdullah Yazidi, 17) Bustami, dan 18) H. Tarmizi Abbas. [54]

B. **Semangat Perjuangan untuk Merdeka**

Secara resmi SMIP-1946 Banjarmasin berdiri pada tanggal 15 Oktober 1946 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzul Qa`dah 1365 H di Banjarmasin. Dengan demikian, jika dilihat dari tahapan perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan ia berada pada masa revolusi (1945-1949), yakni perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir kolonial Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia

[51]H.Muhammad Asy`ari, "Sejarah Singkat SMIP 1946," *Seminar Dalam Rangka Ulang Tahun SMIP-1946.* (Banjarmasin, 2014)., p. 2

[52]Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*., p. 4.

[53]Penyusun., p. 7.

[54]Penyusun., p. 7.

pasca kekalahan Jepang. Tanggal 15 Agustus Jepang menyerah kalah kepada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaanya, yang ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, menunjuk Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan pembagian wilayah negara atas beberapa propinsi. Salah satu propinsi itu adalah Kalimantan dengan Gubernurnya Ir. Pangeran Muhammad Noor. [55] Akan tetapi setelah perundingan Linggarjati tanggal 15 Nopember 1946 yang kemudian kesepakatannya ditandatangani 25 Maret 1947, salah satu diktum dari perjanjiannya tersebut menyatakan bahwa: ”Pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi Negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura,”[56] Isi perjanjian ini telah menapikan Kalimantan sebagai bagian dari Indonesia yang diakui kemerdekaanya.

Dampak dari tidak dimasukkannya Kalimantan sebagai bagian dari wilayah kemerdekaan Indonesia dan gencarnya upaya Pemerintah Kolonial Belanda untuk Kembali mengusasi Kalimantan tentu merupakan pukulan dan sekaligus telah memicu semangat perjuangan masyarakat Kalimantan untuk berjuang lebih keras lagi guna mendapatkan Kemerdekaannya. Suasana kebatinan masyarakat Kalimantan ini tentu tidak terkecuali yang dirasakan oleh para pendiri SMIP-1946 yang baru kurang lebih 1 bulan meresmikan pendiriannya.

Kesadaran dan semangat pengabdian yang diperlihatkan oleh para tokoh pendiri SMIP-1946 dalam memperjuangkan kemerdekaan yang dilakukan melalui pendirian SMIP-1946 ini dibuktikan dengan menjadikan SMIP-1946 sebagai wahana untuk perjuangan kemerdekaan. Hal itu bukan saja oleh para pendirinya tetapi juga oleh para siswanya. Dalam sebuah ceritera yang pernah dituturkan oleh keluarga H.ahmad di Alalak, bahwa pernah suatu ketika K.H. M. Hanafie Gobit ingin dibunuh oleh Belanda dengan cara menenggalamkan jukung (sampan) yang ditumpangi beliau ketika hendak menyampaikan dakwah di pelosok Banjar, namun beliu ternyata bisa selamat. Hal itu karena beliau dipandang sebagai sosok ulama dan pendiri SMIP-1946 yang senantiasa mengobarkan semangat perjuangan untuk melawan penjajahan

[55]Idwar, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*., p. 107-108

[56]Tim CNN Indonesia, “Sejarah Perjanjian Linggarjati: Isi Dan Hasil,” 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210608135009-31-651711/sejarah-perjanjian-linggarjati-isi-dan-hasil-perundingan.%0A.

Kembali colonial Belanda. Selain itu, Khatib Syarbaini Yasir sebagai Kepala SMIP-1946 pada tanggal 08 Desember 1946 menjadi salah seorang pendiri dan pengurus (Ketu II) Serikat Muslimin Indonesia (SERMI) sebagai salah satu organisasi politik yang aktif dalam melakukan perjuangan diplomatik dalam memperjuangkan kemerdekaan Kalimantan.

Dalam rangka membangun semangat perjuangan bagi para siswa-siswa SMIP-1946 Khatib Syarbaini Yasir selaku Kepala sekolah selalu menggelorakan semangat perjuangan ini, utamanya ketika kegiatan muhadharah. Beliau selalu menekankan bahwa didirikannya SMIP-1946 adalah sebagai usaha untuk menciptakan manusia muslim yang benar-benar dapat menjadikan dirinya sebagai hamba Allah sekaligus juga hamba masyarakat, yang dengan istilah beliau "menjadi budak Allah dan budak masyarakat",[57] atau yang dalam rumusan tujuan pendidikan SMIP menjadi lulusan yang "berdedikasi tinggi terhadap nusa, bangsa dan agama".[58] Dorongan semangat perjuangan pengabdian tersebut telah berhasil membakar semangat para siswa SMIP-1946 untuk ikut berjuang merebut kemerdekaan Kalimantan. Hal itu sebagaimana ditulis oleh H. M. Asy`ari sebagai siswa Angkatan ke 2 (tahun 1947):

> Putra-putri asuhan SMIP di kala itu banyak yang melibatkan diri dalam gerakan perjuangan bersenjata merebut kemerdekaan di daerah. Banyak wajah-wajah tua yang sebagiannya kini sudah keriput itu, dulunya adalah wajah-wajah remaja pemberani yang ikhlas menerima tantangan al-maut. Mereka tercatat sebagai anggota kesatuan gerilia yang mereka namakan sendiri dengar sebutan AKSI (Angkatar Kesatuan Siswa Indonesia) yang tergabung dalam ALRI Divisi IV. Organisasi ini adalah satu-satunya kesatuan gerilia pelajar di daerah ini yang paling aktif beroperasi dan juga satu-satunya yang terbesar serta terorganisir dengan rapi. Seluruh pimpinan dan anggota teras yang dikerahkan dalam kegiatan operasi di lapangan adalah seluruhnya terdiri dari pelajar SMIP di kala itu.[59]

Hal tersebut di atas membuktikan bahwa SMIP tidak hanya sekedar tempat belajar mencari ilmu untuk menyiapkan ngenerasinyang cerdas dan berakhlak, , tetapi juga sebagai tempat membina kader pejuang militan yang siap dengan ikhlas berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan bangsa.[60]

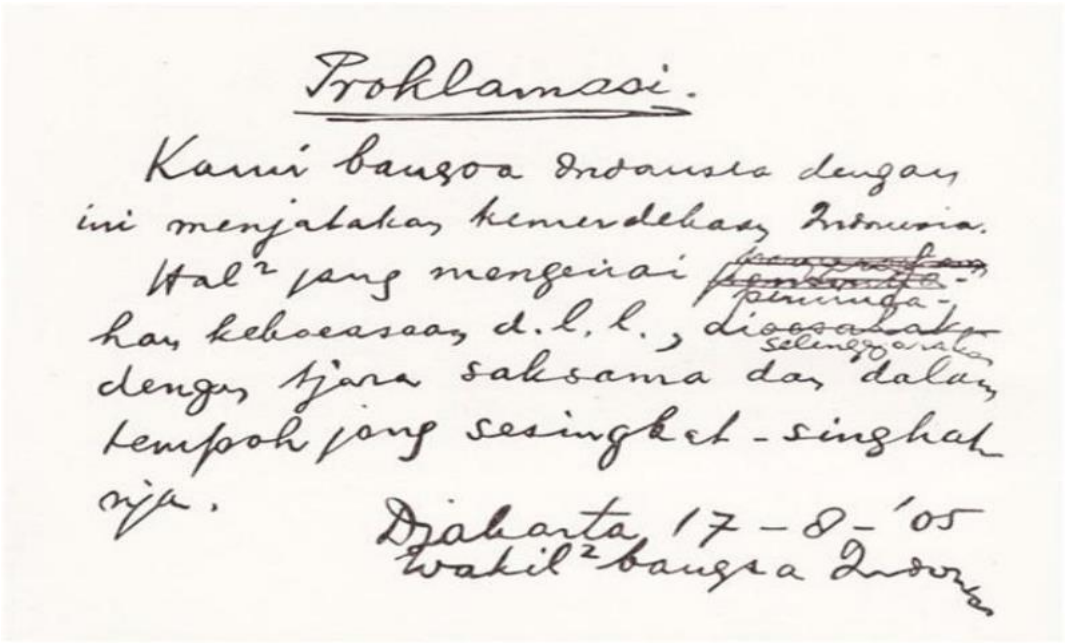
[57]Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*., p. 5.
[58]Penyusun., p. 5.
[59]Asy`ari, "Sejarah Singkat SMIP 1946.", p. 2-3
[60]Asy`ari., p. 2-3.

Gagasan menjadikan sekolah sebagai wahana untuk menumbuhkan semangat perjuangan membela negara, sebagaimana dikembangkan oleh SMIP-1946 ini mirip dengan pemikiran Rif`ah Badawi Rafi Al-Tahtawi (1801-1873) seorang pembaharu pendidikan pertama di Mesir, yang diduga juga mempengatuhi pemikiran para pembaharu SMIP-1946 ini. Sebagaimana dikutip oleh Harun Nasution dari salah satu buku yang ditulis oleh al-Tahtawi yang berjudul "*Al-Mursyidul Amin Lil Banat wal Banin"*, bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetatpi terutama untuk membentuk rasa kepribadian dan untuk menanamkan rasa patriotism (*hubbul wathan*). Patriotisme adalah dasar yang penting dan kuat untuk mendorong orang mendirikan suatu masyarakat yang memopunyai peradaban. Dalam kewjiban seorang terhadap tanah airnya termasuk mengadakan persatuan, tunduk kepada undang-undang dan sedia mengorbankanharta dan diri. Di antara hak-hak-hak yang terpenting bagi seorang warga negara ialah kemerdekaan, karena kemerdekaanlah yang dapat mewujudkan masyarakat yang sejati dan patriotism yang kokoh.[61]

C. Semangat untuk Mengisi Kemerdekaan Melalui Upaya Mencerdaskan kehidupan Bangsa

Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka salah satu yang terpikirkan oleh bangsa Indonesia, termasuk di Daerah Banjar adalah apa saja upaya yang hatrus dilakukan untuk mengisi kemerdekaan tersebut dengan sebaik-baiknya yang dilakukan secara mandarin oleh bangsa Indonesia sendiri dalam waktu yang secepatnya. Hal itu secara jelas tertuang dalam Teks Proklamsi, sebagai berikut:

[61]Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*., p. 42-49.



Proklamasi.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal² yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17-8-'05
Wakil² bangsa Indonesia

Untuk mengambil alih pemerintahan dan mengisi kemerdekaan tersebut tentu bukanlah suatu hal yang mudah, lebih-lebih dalam kondisi masyarakat Indonesia yang telah lama dijajah dan tidak mendapatkan kebebasan dan kesempatan yang baik dalam pembinaan sumber daya manusianya. Keterbatasan sumber daya itulah salah satu yang menjadi perhatian utama dari para pemuka masyarakat untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang dapat mencetak tenaga terdidik yang pada gilirannya dapat mengisi kemerdekaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan itu, dapat dinyatakan bahwa pendirian SMIP di tahun 1946 ini adalah merupakan bagian dari cita-cita tersebut, yakni mengisis kemerdekaan (pemindahan kekuasaan dll) melalui upaya mencerdaskan umat Islam untuk dapat mengambil peran dalam mengisi kemerdekaan yang telah diproklamirkan. Motivasi inilah yang kemudian menjadi landasan untuk melahirkan gagasan model SMIP dengan segala atribut gagasannya.

Motivasi dari para penggagas, yang notabene para ulama dan pejuang kemerdekaan, tentu sangat beralasan jika mengutip pendapatnya Kevin W. Fogg (2020) yang menyebut “revolusi Islam Indonesia” yang mengisyaratkan bahwa umat Islam (kaum santri) harus dapat mengambil haknya dari perjuangan kemerdekaan yang diraih dengan perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar dari kaum muslimin. Sebagaimana Ia mengartikan bahwa revolusi Islam Indonesia memiliki dua pengertian:

Pertama, dalam memandang perang kemerdekaan, kaum santri yang berjuang melawan Belanda memahami ini sebagai perjuangan untuk tujuan-tujuan Islam dan mengorganisasi diri dengan cara-cara Islam. Jadi, perubahan negara yang terjadi memalui perjuangan militer memiliki cita rasa islami bagi Sebagian partisipan yang lumayan besar (antara seperempat sampai setengah rakyat Indonesia jika merujuk data tentang kaum santri tahun 1950-an). Kedua, dalam memandang revolusi politik dengan berdirinya sebuah negara baru, ada transformasi-transformasi fundamental dalam ahal Islam memengaruhi politik dan dalamm hal politik memengaruhi kehidupan Islam. Transfromasi-transformasi ini menyebabkan sebuah revolusi dalam praktik dan pemahaman Islam di Indonesia, mengonsolidasi struktur-struktur untuk menerapkan ortoduksi yang didefinisikan negara, mendahulukan non-ulama sebagai pemimpin politik untuk masyarakat Muslim, dan memecah kesatuan politik kaum santri.[62]

Para penggagas SMIP-1946 yang notabene para pendidik (yang tergabung dalam PGSI dan sebagai tokoh masyarakat yang ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, khususnya kemerdekaan Kalimantan, tentu upaya yang paling terpikirkan adalah upaya mengisinya melalui jalur pendidikan. Sehubungan dengan itulah SMIP-1946 ini didirikan. Secara jelas hal ini sebagaimana tertulis dalam buku Lima Puluh Tahun "SMIP-1946", bahwa salah satu latar belakang didirikannya sekolah ini adalah dalam rangka "usaha perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa" atau "menghasilkan para alumnus SMIP yang tidak hanya menjadi putra=putri yang cerdas dan terampil, tetapi juga bertaqwa, berbudi pekerti luhur serta berdedikasi tinggi terhadap nusa dan bangsa."[63]

Motavasi mengisi kemerdekaan melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendirian lembaga pendidikan SMIP-1946 ini tentu juga tidak lepas dari kesadaran akan pentingnya merubah nasib rakyat Indonesia yang telah mendapatkan diskriminasi dan pembatasan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang

[62]Fogg, *Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia*., p. 21-22.
[63]Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*., p. 5.

yang berdampak pada kondisi kualitas pendidikan rakyat Indonesia yang memprihatinkan pada awal kemerdekaan.

1. Kondisi Pendidikan Masyarakat Daerah Banjar Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda.

Kondisi dan situasi pendidikan pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda yang memicu semangat untuk melahirkan lembaga pendidikan Islam model SMIP-1946 tersebut dikarenakan kesempatan masyarakat Islam pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sangatlah terbatas dan dibatasi. Tidak semua masyarakat dapat mengecap pendidikan yang layak dan bermutu (utamanya untuk mendapatkan pengetahuan umum yang layak) sebagaimana yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Meskipun pemerintah Belanda memberikan kesempatan bagi rakyat pribumi, utamanya sejak diterapkannya 'politik etis' oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal abad ke-20, namun untuk mengakses lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kolonial Belanda tersebut sangat dibatasi dan diskriminatif.[64] Di samping itu, kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam yang secara umum tidak mendapat perhatian dengan baik karena senantiasa diawasi dan dicurigai, utamanya pasca munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh berbagai organisasi pergerakan rakyat Indonesia di Daerah Banjar, seperti: lembaga pendidikan yang didirikan oleh SI, *Musyawaruttalibin*, Perguruan Rakyat Parindra, Persatuan Perguruan Islam (PPI), Sekolah taman Siswa, dll.[65]

Jika dilihat lebih khusus kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda di Kalimamntan Selatan dalam hal akses pendidikan, maka jenis sekolah yang bisa diakses pada masa itu ditentukan berdasarkan strata masyarakat yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial belanda, yaitu:

1) *Europese Lagere School* (ELS), yaitu sekolah setingkat sekolah dasar dengan lama pendidikan 7 tahun. Pembelajaran menggunakan Bahasa pengantar Bahasa Belanda dan husus untuk orang Belanda atau orang yang mendapat persamaan hak dengan Belanda;

[64]Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*., p. 30-31.
[65]Ramli Nawawi. dkk., p. 49-98.

2) *Holands Chinese School* (HSC), yaitu sekolah setingkat dasar dengan lama pendidikan 7 tahun. Pembelajaran menggunakan Bahasa Belanda. Sekolah untuk golongan orang Cina. Mereka dikategorikan sebagai golongan kelas dua atau golongan menengah oleh pemerintah colonial Belanda.
3) *Holland Inlandse School* (HIS), yaitu pendidikan setingkat sekolah dasar dengan lama pendidikan 7 tahun. Pembelajarannya menggunakan Bahasa Belanda. Sekolah ini diperuntukan untuk rakyat Indonesia. Akan tetetapi Pemerintah kolonial Belanda menerapkan seleksi yang ketat dan diskrimitatif dalam memberikan kesempatan untuk sekolah ini. Hanya masyarakat pribumi yang menempati kategori A dan B saja yang dapat mengakses sekolah ini, yaitu golongan anak priyayi dan orang-orang yang telah membayar pajak yang besar yang diberikan kesempatan oleh pemerintah Kolonial Belanda.[66]
4) *Inlandse School Door Tweedeclate* (Sekolah Kelas Dua), yaitu sekolah yang diperuntukkan bagi masyarakat pribumi (*inlanders*) golongan rakyat pribumi kelas C. Sekolah ini lama belajarnya selama 5 tahun. Pembelajarannya menggunakan Bahasa daerah (Bahasa Melayu). Di sekolah ini siswa diberikan pelajaran berhitung, menggambar, Bahasa Melayu, Ilmu Bumi dan Menulis Indah. Mata pelajaran sejarah tidak diberikan , kecuali Sejarah Hindia Belanda. Selain itu siswa juga diberikan pelajaran Huruf Arab Melayu. Tidak ada pelajaran agama. Jumlah sekolah ini di Daerah Banjar terdapat sebanyak 13 buah yang masing-masing berada di beberapa kabupaten.[67]
5) *Volksschool* (Sekolah Rakyat), yaitu sekolah setingkat sekolah dasar yang benar-benar untuk rakyat kecil yang ada di hamper seluruh desa, sehingga sekolah ini juga disebut Sekolah Desa. Lama belajar pada sekolah ini hanya 3 tahun. Mata pelajaran yang diberikan meliputi: Membaca, Berhitung, Dekti, dan Menulis

[66]Pemerintah Kolonial Belanda menyebut masyarakat pribumi sebagai sebut dengan *inlander"* (mereka dipandang tidak memiliki kemampuan alamiah untuk dapat memasuki dunia ilmu dan ketrampilan yang demikian peliknya). Ada tiga strata, yaitu: kategori A adalah kaum bangsawan, pejabat tinggi serta pengusaha kaya yang berpenghasilan berssih 75 golden sebulan. Kategori B adalah orang tua yang memperoleh pendidikan MULO dan Kweekshool ke atas. Kategori C adalah pegawai kecil, pengusaha kecil, moliter atau orang tua yang memperoleh pendidika HIS Ramli Nawawi. dkk., p. 31-33.

[67]Idwar, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. p. 34-35.

Indah, jadi sekedar untuk tidak buta huruf. Siswa yang lulus sampai kelas tiga dapat melanjutkan ke *Inlandse School* kelas 4.[68]

6) *Vervolgschool* (Sekolah Rakyat Lanjutan dari *Volksschool*), yaitu sekolah ini juga untuk rakyat pribumi kelas C yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengganti Sekolah Kelas Dua yang terpaksa dibubarkan karena menghemat biaya Pemerintah Kolonial Belanda. Sekolah ini juga lama belajarnya selama 5 tahun, yang dapat dimulai dari kelas 1 atau kelas 4 bagi yang lulusan *Volksschool*.[69]
7) *Schakel School* (Sekolah Rantai Penyambung), yakni sekolah yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk menghubungkan sekolah "bumi putera" dengan "sekolah Belanda". Pemerintah Kolonial Belanda memberikan kesempatan bagi lulusan *Vervolgschool* untuk meneruskan ke sekolah Belanda yang lebih tinggi, yati MULO, tentu dengan persyaratan yang sangat ketat, utamanya terkait dengan status.
8) *MULO* (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), yaitu Sekolah setingkat Menengah Pertama (SMP) sekarang dengan lama pendidikan 3 tahun. Sekolah ini tidak bisa diakses oleh bumi putera. MULO yang bisa diakses oleh bumi putera tamatan *vervolgschool* didirikan khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan nama *Inheense MULO* (*MULO* Bumiputera) dengan lama belajar selama 4 tahun.

Selain lembaga pendidikan dalam bentuk sekolah umum, Pemerintah Kolonial Belanda juga mendirikan sekolah kejuruan, dan pendidikan dalam bentuk kurus-kursus, yang menerima siswa tamatan *volkschool*, seperti: (1) *Ambachtschool* (Sekolah Pertukangan) di Kebun Sari Amuntai, dengan lama belajar 3 tahun; (2) *Klein Handelschool* (Sekolah Dagang) di Banjarmasin dengan lama belajar 3 tahun. Selain itu terdapat juga sekolah dagang dalam bentuk 1 satu tahun tambahan belajar bagi siswa *Vervolgschool*; (3) *Lanbouw Cursus* (Kursus Pertanian) yang terdapat di beberapa daerah. Cursus ini menerima juga siswa lulusan *Vervolgschool* 5 tahun, untuk menjadi calon pegawai mantri pertanian; (4) *Meisjesvolkschool* (Sekolah

[68]Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*., p. 38-39.
[69]Ramli Nawawi. dkk., p. 39-40.

Kejuruan Wanita) di Barabai, Kandangan, Amuntai dan Rantau. Sekolah ini terdiri dua bentuk, yaitu *Meisjesvolkschool* 3 tahun dan *Meisjesvolkschool* 5 tahun.[70]

Selain sekolah umum dan kejuruan di atas, Pemerintah Kolonial Belanda juga mendirikan sekolah guru (*Kweekschool*). Sekolah ini diperuntukkan untuk mendidik calon guru bantu pada sekolah kelas dua dan *volkschool*. Sekolah ini hanya menerima siswa atau peserta dari orang tua yang memegang peranan, karena itu disebut "sekolah Raja". Selain itu untuk memenuhi kebutuhan guru bagi *volkshool* atau sekolah Desa yang banyak, maka siswa lulusan *Gobernamen* Kelas Dua atau *Vervolgschool* yang cerdas direkrut menjadi peserta magang di *volkschool* di bawah bimbingan Kepala Sekolah (Mantra Guru) selama 1 tahun. Pelajaran lebih bersipat praktis, yakni tentang bagaimana cara mengajar berhitung, membaca, imla, dsb. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhannguru, juga dibuka kursus yang diberi nama *Cursus Volk Ondrwijzer* (CVO) dengan lama belajar semala 2 tahun setelah *Vervolgschool.* Sekolah ini terdapat sebanyak 8 buah di Daerah Banjar. Bentuk lain sekolah guru ialah *Normalcursus* dan *Normal Leergang*, dengan lama belajar selama 2 tahun. Kurusus dilaksanakan di sore hari sedangkan paginya mereka mengajar di *Volkschool.* Peserta dari kursus ini adalah lulusan CVO yang telah bertugas sebagai pengajar di *Volkschool.*[71]

Meskipun Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan sekolah khusus untuk pribumi dan memberikan akses kepada masyarakat pribumi (Islam) untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut, namun kesan diskriminatif dan kesan melecehkan bangsa pribumi. Upaya diskriminatif tersebut nampak nyata bukan saja dibandingkan dengan bangsa Belanda (Erofa) tetapi juga dengan bangsa lain seperti Cina dan Arab. Bahkan sebagimana ditulis dalam buku "Sejarah Pendidikan Daerah Daerah Banjar" disebutkan:

> Sekolah yang didirikan pemerintah colonial bukan untuk bangs "*Inlander*" (bangsa pribumi), mereka dianggap tidak mempunyai kemampuan alamiah untuk bisa memasuki dunia ilmu dan keterampilan yang demikian peliknya. Begitulah

[70]Ramli Nawawi. dkk., p. 43-45.
[71]Ramli Nawawi. dkk., p. 34-48.

pendapat segolongan orang Belanda *konservatif* terhadap sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial.

Seorang "*inlander*" baru dapat menikmati pendidikan setelah melewati seleksi yang ketat, bukanseleksi kecerdasan, tetapi seleksi ras dan status. Seleksi ras menempati ketentuan pertama. Ras yang diutamakan adalah ras Belanda yaitu rasErppah, yang kedua adalah ras Cina dan yang terbawah adalah ras "inlander".[72]

Kondisi seperti tergambar di atas itulah yang memotivasi umat Islam, khususnya di daerah Banjar untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam, bukan saja pada saat pemerintahan kolonial Belanda tetapi juga dalam tahapan selanjutnya, termasuk di masa revolusi dan pasca kemerdekaan. Kalau dilihat perkembangan selama pemerintahan Belanda, pembangunan lembaga pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar 80% merupakan sekolah-sekolah agama (Islam). [73] Salah satu faktor utama yang mendorong pendirian lembaga pendidikan Islam oleh umat Islam di Daerah Banjar itu ialah untuk menandingi sekolah-sekolah umum yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial. Tandingan ini diamksudkan untuk menyediakan tempat belajar bagi anak-anak mereka agar tidak memasuki sekolah-sekolah Belanda yang oleh masyarakat dianggap sebagi ingin mengkritenkan anakpanak mereka. [74]

Upaya pendirian sekolah baru ada yang dilakukan oleh perorangan dan ada pula yang dilakukan oleh organisasi pergerakan Islam.Upaya itu umumnya dimotori oleh para ulama dan tokoh maasyarakat yakni dengan memodernisasi sistem pendidikan tradisional yang sudah ada dan berangsung sebelumnya dan mendirikan lembaga pendidikan Islam baru yang modern, yakni lembaga pendidikan Islam yang menerapkan sistem sekolah dan memberikan sejumlah mata pelajaran umum, hanya saja kualitas pelajaran umumnya masih terbatas dan kualitasnya masih belum memadai. Pembaharuan pendidikan dalam bentuk sekolah pertama dimulai oleh Muhammad bin Thalib dan Umar Binsef, yang kemudian dilanjutkan noleh Saleh Balala dari perkumpulan orang-orang Arab yang mendirikan sekolah tingkat dasar yang bernama *Islamsche School* yang terletak di Jalan Sulawesi Banjarmasin pada tahun 1914. Sekolah ini menerapkan sistem pendidikan seperti yang dilakukan pada

[72]Ramli Nawawi. dkk., p. 30.
[73]Ramli Nawawi. dkk., p. 50.
[74]Ramli Nawawi. dkk., p. 50.

sekolah Belanda, yakni menggunakan kelas yang dilengkapi meja, kursi dan papan tulis. Begitu juga waktu belajar dan kurikulum yang menngajarkan mata pelajaran umum selain agama. Perkembangan pembaharuan pendidikan dalam bentuk sekolah di tingkat dasar ini dilanjutkan oleh para tokoh ini yang kemudian bergabung dengan organisasi Muhammadiyah pasca hadir di Alabio dan menyebar ke seluruh daerah di Daerah Banjar. [75]

Eksistensi dan keberlangsungan lembaga pendidikan Islam yang didirikannoleh umat Islam itu, bukan tanpa tantangan. Jika dilihat dari perkembangan pendidikan Islam di masa Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, maka sebagaimana dikemukakan oleh Samsul Nizar (2008):307-308) pendidikan Islam dikembangkan di bawah kebijakan politik yang dijalankan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang didasari oleh rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya yaitu Kristen dan rasa kolonialismenya. Dengan begitu mereka menerapkan peraturan dan kebijakan sebagai berikut:

1) Pada tahun 1882 M Pemerintah Kolonial Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut "*Priesterraden*." Atas nasihat dari badan inilah maka pada tahun 1905 M pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran (baca: pengajian) harus minta izin terlebih dahulu.
2) Pada tahun 1925 M Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan Islam, yaitu bahwa tidak semua orang (Kyai) boleh memberikan pengajaran. Peraturan ini diberlakukan karena adanya gerakan organisasi pendidikan yang sudah tampak tumbuh, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam (PSI), Al-Irsyad, dan lain-lain.
3) Pada tahun 1932 M keluar pula peraturan yang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak diberikan izin untuk memberikan pengajaran

[75]Syaharuddin, *Orang Banjar (Menjadi Indonesia)Dinamika Organisaasi Islam Di Borneo Selatan 1912-1942*, ed. M.Nazir S, ketiga (Yogyakarta: Eja Publisher, 2017). p. 47.

atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*).[76]

Kondisi sosio hostoris dan pengalaman pendidikan yang telah dialami selama masa Pemerintahan Kolonial Belanda tersebut diatas, tetu bukan saja memberikan pengalaman traumatik bagi masyarakat yang tidak boleh terulang, tetapi juga pada sisi lain harus diakui telah memberikan pelajaran berharga bagi para tokoh masyarakat dan ulama dalam membangun lembaga pendididikan Islam pasca kemerdekaan. Tentu ada hal-hal positif yang dapat diambil sebaliknya tentu ada hal-hal yang negatif atau tidak cocok untuk diterapkan dalam pendidikan Islam. Hal ini tentu sejalan dengan apa yang dipahami dan diyakini oleh para ulama pembaharu (seperti para ulama penggagas berdirinya SMIP-1946 ini). sebagaimana yang sering disebut dalam ungkapan atau paradigma "*al-muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah*, yakni 'Memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik". atau bahkan, sebagaimana sering diungkapkan oleh Amin Abdullah, "bukan saja *akhdzu bil jadidil ashlah*, tetapi juga *al-ajdu bil jadidil ashlah".* Hal itulah yang kemudian dailakukan oleh para pendiri SMIP-1946 ketika melahirkan gagasan pendirian lembaga pendidikan Islam ini.

2. Kondisi Pendidikan Masyarakat Daerah Banjar Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang.

Pada masa Pemerintahan Pendudukan Jepang di Daerah Banjar, sebagaimana di daerah lain di Indonesia, secara umum kondisi pendidikan Islam mendapatkan kelonggaran untuk berkembang dibandingkan dengan masa Kolonial Belanda, utamanya secara kuantitatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Harry J Benda, kedatangan Jepang langsung dirasakan oleh umat Islam melalui pembentukan *Shumubu* (Kantor Urusan Agama) yang ketuai oleh kolonel Horie pada bulan sejak Maret 1942 di ibu kota dan pada tahun 1944 dibuka cabang-cabangnya yang bernama *Shumuka* di seluruh Indonesia.[77] Dalam perkembangannya Shumubu menangani urusan-

[76]Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Ed. 1, Cet (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)., p. 307-308.

[77]Harry J. Benda, *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit : Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).p. 142, 147.

urusan yang berkaitan dengan fungsi Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Pendidikan, dan Keagamaan Umum.[78] Sebagaimana dikemukakan oleh Ramayulis secara umum kondisi pendidikan di Indonesia, bahwa pendidikan Islam mendapatkan kelonggaran untuk berkembang dibandingkan dengan masa Kolonial Belanda. Pertama, pada masa awal pendudukan Jepang, madrasah diberikan kelonggaran untuk berkembang terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatra yang terkenal dengan madrasahnya, yang diilhami oleh majlis ulama tinggi; Kedua, pendidikan agama di sekolah Sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan pada guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama, dan di dalam pendidikan agama tersebut juga di masukan ajaran tentang jihad melawan penjajah; Ketiga, Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Perguruan tinggi Islam dalam bentuk Sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, KH. Muzakkar, dan Bung Hatta.[79] Walaupun Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan dalam mengembangkan pendidikan, namun maksud dari pemerintah Jepang tidak lain hanyalah upaya Jepang menyusun kekuatan dari umat Islam dan nasionalis Indonesia agar dapat dibina demi kepentingan perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang. Dunia pendidikan yang seharusnya dikembangkan tetapi secara umum terbengkalai. Para siswa di sekolah tiap harinya hanya disuruh gerak badan, baris-berbaris, bekerja bakti (romusha), bernyanyi dan lain sebagainya, sehingga praktis mereka tidak mendapatkan pengajaran yang layak sebagaimana mestinya.[80] Dengan demikian, secara umum kuantitas pendidikan Islam dapat berkembang dengan baik, namun secara kualitatif pendidikan Islam mengalami penurunan.[81]

Ketika Jepang menduduki Daerah Banjar, mereka menemukan sistem pendidikan kolonial Belanda yang mendidik rakyat sesuai dengan status sistem yang berlaku dalam masyarakat kolonial serta disesuaikan untuk kebutuhan masyarakat jajahan. Sistem pendidikan kolonial yang ada tidak menguntungkan Jepang bagi kepentingan perangnya, dan hasil pendidikan dari sistem yang ada tidak dapat diharapkan untuk dapat menunjang perang mereka dan untuk membentuk lingkungan kemakmuran Bersama Asia Timur Raya sesuai dengan cita-cita *Hakko I Ciu* . Setelah

[78]Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Politik*, ed. Imron Nasri (Yogyakarta: Volume Yogyakarta, 2018). p. 20.

[79]Haji Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam : Napaktilas Perubahan Konsep, Filsfat Dan Metodologi Dari Era Nabi SAW Samapi Ulama Nusantara* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011).

[80]Zuhairini. et.all, *Sejarah Pendidikan Islam*, 1st ed., vol. 11 (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). p. 150-152.

[81]Fogg, *Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia*., p. 20.

dalam waktu yang singkat Jepang berhasil mengkonsolidasikan kekuatan, sistem pendidikan itu segera diubah dan disesuaikan dengan keperluan tersebut di atas. Penekanan dari cara pendidikan yang diberikan adalah disiplin dan rasa patriotisme (kedaerahan) dan Japanisasi kebudayaan. Di sekolah-sekolah bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa pengantar sedang bahasa Jepang diajarkan sebagai bahasa utama. Rakyat diberikan kesempatan untuk sekolah dan diskriminasi pendidikan yang dilakukan di masa pemerintah Hindia Belanda dahulu dihapuskan. Penyelenggaraan sekolah ditangani langsung oleh Jepang kurikulumnya lebih ditekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan usaha Japanisasi generasi muda seperti disiplin militer, lagu-lagu Jepang, gerak badan dan upacara bendera Hinomaru., penghormatan pada *Tenno Heika* serta peng- gunaan bahasa Jepang. Jumlah sekolah bertambah secara signifikan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu tiga tahun telah bertambah sekolah dari tahun 1942 hingga 1945 jumlah sekolah dari 196 buah menjadi 525 buah dengan berbagai jenis sekolah.[82]

Meskipun tampaknya ada keberpihakan kepada umuat Islam, namun semua itu hanya sebuah taktik yang dilakukan untuk mendapatkan simpati dan bantuan rakyat Indonesia untuk kepentingan memenangkan peperangan yang dilakukan oleh Jepang. Jika dilihat pada kondisi pendidikan, justru keadaan berbalik dengan adanya penambahan kesempatan belajar tersebut. Pada masa pendudukan Jepang itu kondisi pendidikan Islam dapat dikatakan agak memperitatinkan. Dengan adanya pelarangan oleh pemerintahan Jepang terhadap semua kegiatan partai dan organisasi politik sosial lainnya, dalam bentuk apa pun kecuali organisasi bentukan pemerintah pendudukan Jepang, maka demikian praktis aktivitas organisasi keagamaan, seperti Sarikat Islam Musyawaratutthalibin, Muhammadiyah, dan NU yang banyak mengelola pendidikan juga dapat dikatakan tidak bisa berkembang bahkan ada yang mati suri, [83] bahkan sejak tahun 1942 Musyawaratutthalibin sudah dinyatakan berakhir.[84]

Pada sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah Jepang tidak diberikan pelajaran Agama (baik Agama Islam maupun Agama Kristen), murid-murid sekolah hanya diizinkan untuk mengikuti pelajaran Agama yang diberikan di luar sekolah,

[82]Idwar, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. p. 94.
[83]Idwar. p. 94.
[84]Maksum, "Musyawaratutthalibin , Organisasi Islam Lokal Terbesar Di Kalimantan Selatan."

seperti yang diberikan oleh para ulama dengan sistem tradisional.[85] Meskipun para ulama diberikan kebebasan untuk memberikan pelajaran agama kepada masyarakat di langgar-langgar dan di mesjid-mesjid, namun dengan catatan harus rnemberikan pelajaran sambil mempropagandakan kepentingan Jepang. Beberapa Madrasah/ pesantren ditutup, seperti Pesantren Nurul Islam di Amuntai dan Darussalam di Martapura ditutup oleh pemerintah Jepang. Dengan demikian para ulama atau guru-guru agama Islam pada berbagai lembaga pendidikan Islam hanya bisa mencari jalan sendiri untuk mengajarkan agama, yakni dengan mengusahakan pelajaran di rumah-rumah.[86]

Kondisi pendidikan masyarakat di daerah Banjar yang terjadi dan dialami pada masa pendudukan Jepang ini juga memperkuat umat Islam melalui para ulama dan tokoh masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam yang lebih baik dan lebih maju, lebih-lebih kemudian ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.

3. Situasi dan Kondisi Pendidikan Islam Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI (Sebelum Berdirinya SMIP-1946).

Sepeninggal pemerintah pendudukan Jepang dan diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pemerintah Kolonial Belanda berupaya untuk menguasai Borneo (Kalimantan) sebagai bgian dari daerah jajahan Belanda. Kondisi ingin kembalinya pemerintahan colonial Belanda itu tentu tidak menguntungkan bagi rakyat Borneo, khususnya di Borneo Selatan atau Daerah Banjar, yang telah bertekad untuk segera memecahkan problema keterbelakangan pendidikan, baik yang disebabkan oleh pemerintah colonial Belanda maupun Jepang setelah tercapainya kemerdekaan. Oleh karena itulah, maka rakyat Daerah Banjar di samping harus berjuang melawan pendudukan Kembali pemerintah Belanda, juga harus tetap berupaya untuk mewujudkan cita-cita yang termaktub dalam isi proklami kemerdekaan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Tekad untuk mendirikan pendidikan Islam yang lebih berkualitas untuk mengisi kemerdekaan tersebut, disebabkan kondisi pendidikan rakyar daerah Banjar

[85]Idwar, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. p.101
[86]Idwar. p. 104.

utamanya umat Islam yang masih sangat memperihatinkan. Beberapa kondisi yang tergambar, khususnya yang dilihat oleh para pendiri SMIPO-1946 ialah:

1) Pemerintah Kolonial Belanda melalui NICA beberapa sekolah yang sebelumnya dirumah namanya oleh Pemerintah Pendudukan Jepang dikembalikan namanya seperti ketika pemerintahan Kolonial Belanda, seperti: (1) Sekolah tingkat dasar kembali *Hustsu Tjo Gakko* dikembalikan menjadi *MOLU,* tetapi dengan behasa pengantar Bahasa Indonesia. Bahas Belanda diajarkan Kembali; (2) Sekolah Guru tingkat *Kyoi Yoseijo* 2 tahun Kembali menjadi *Cursus Volks Onderwijer (CVO),* sedangkan sekolah guru 4 tahun*Sihan Gakko* menjadi *Normalschool;* (3) Selain itu ada sekolah guru yang bernama *Voor Volk Onderwijzer*.[87]
2) Keberadaan lembaga pendidikan Islam tidak banyak yang bertahan dan bisa Kembali setelah dibekukan oleh pemerintah Pendudukan Jepang. Beberapa lembaga pendidikan Islam yang Kembali bisa eksis seperti lembaga pendidikan Rasyidiyah di Amuntai, Darusslam di Martapura, PPI di Barabai, Ashriyah di Banjarmasin, dan sejumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah. Sedangkan lembaga pendidikan yang dikelola oleh *Musyawaratuthalibin*, banyak sekali yang tutup dan tidak bisa eksis Kembali atau berubah dikelola oleh perorangan dan masuk menjadi bagian dari lembaga pendidikan yang dibawah naungan NU.
3) Jumlah lulusan sekolah Islam tingkat dasar/ibtidaiyah jumlahnya cukup banyak yang disebabkan pada masa pemerintahan colonial Belanda dan Jepang tidak dpat melanjtkan karena diskriminasi dan keterbatasan lembaga pendidikan lanjutan yang ada seperti madrasah tsnawiyah dan *wosthaschool* dan sejenisnya.
4) Kelemahan penguasaan ilmu pengethaun umum sangat dirasaakan oleh kalangan umat Islam, sebagai akibat tidak diberikannya pengetahuannumum yang cukup di lembaga-lembaga pendidikan Islam dan sangat terbatasnya umat Islam yang dapat mengikuti pendidikan yang dikelola oleh pemerintah Kolonial Belanda yang nota bener telah memberikan ilmu pengetahuan numum yang lebih baik.
5) Dikotomi ilmu pengetahuan baik dalam tataran pemikiran dan praktik masih terdaopat di kalangan umat Islam. Masih ada yang berpandangan bahwa ilmu

[87]Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*., p. 99.

pengetahuan umum itu haram karena berasal dari orang kapir atau paling tidak itu hanya untuk kepentingan dunia dan urusan dunia.

6) Selain itu, sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang berdirinya SMIP-1946, bahwa pada saat itu atau sebelum SMIP-1946 didirikan, belum ada sekolah Islam yang bertingkat mengengah pertama yang didirikan oleh umat Islam di Daerah Banjar.[88]

[88] Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*., p. 4.

BAB III

PROFIL ULAMA PENDIRI SMIP-1946

Sebagaimana dikemukakan pada Bab Pendahuluan, bahwa para ulama atau guru agama para pengagas pendirian "SMIP 1946" adalah para ulama dan guru agama serta pengusaha. Para ulama dan guru agama yang terlibat dalam pendirian SMIP-1946 ini adalah mereka yang tergabung di dalam organisasi Persatuan Guru Sekolah Islam (PGSI),[89] antara lain: H. Khatib Syarbaini Yasir, H. Muhammad Hanafie Gobit, H. Ahmad Amin, H. Busyera Qasim, H. Hasan Mugeni Marwan, H.M. Yasin Amin, H. Muhammad Dahlan, H.M. Hasan Baseri, H. Masykur, H. Raden. Sedangkan para pengusaha, antara lain: H.A. Gazali, H. Jailani Sahari, H. Djarkasi.[90]



PGSI adalah orgnaisasi yang kelahirannya dilatarbelakangi oleh adanya kerisauan para ulama dan guru-guru Agama Islam atas kondisi obyektif yang sedang menyelimuti umat Islam di kala itu, terutama di bidang pendidikan keagamaan, yang pada umumnya tidak lagi terbina serta terawat sebagaimana mestinya, utamanya

[89]Penyusun., p. 4.
[90]Wawancara dengan H. Julaikha dan Dra. Hj. Mashunah Hanafie Gobit, alumni SMIP-1946.

selama era pemerintahan pendudukan Jepang dan pada awal kemerdekaan. Banyak lembaga pendidikan Islam yang tutup atau berhenti beroperasi karena dilarang oleh Pemerintah Pendudukan Jepang, kualitas pendidikan masyarakat tidak maksimal karena oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang pendidikan lebih diarahkan pada upaya untuk kepentingan perang yang dilakukan oleh Jepang, pendidikan agama hanya boleh diberikan secara informal dan non formal. Begitu juga ketika awal kemerdekaan dan masuknya kembali Pemerintah Kolonial Belanda menyebabkan banyak para ulama dan guru agama yang sibuk ikut berjuang untuk kemerdekaan Kalimantan. Untuk tujuan mengatasi hal itulah PGSI didirkan. Oleh karena itu, salah satu perhatian khusus yang diberikan oleh PGSI ialah mendirikan sekolah menengah Islam Pertama, yang pada saat itu di Daerah Banjar belum ada sebuah lembaga pendidikan agama Islam dalam bentuk sekolah Islam yang setingkat menengah yang dapat memberikan pembinaan penguasaan ilmu pengetahuan umum di samping penguasaan ilmu pengetahuan agama yang seimbang.[91]

PGSI sebagai organisasi persatuan guru sekolah Islam dimotori oleh para ulama dan guru-guru agama yang tidak melihat latar belakang organisasi dan asal sekolah. Sehingga para ulama dan guru-guru agama yang tergabung dalam PGSI yang kemudian mendirikan SMIP-1946 ini dilihat dari latar belakang organisasi cukup beragam, yakni ada yang merupakan pimpinan organisasi sosial kegamaan seperti mantan aktivis *Musyawaratutthalibin,* NU, Muhamadiyah, al-Irsyad dan lainnya. Sebagai contoh: H. M. Hanafie Gobit adalah mantan pendiri dan aktivis *Musyawaratutthalibin*, H. Chatib Syarbaini Yasir disamping sebagai guru agama yang bekerjsama dengan *Musyawaratutthalibin* juga sebagai pendiri dan aktivis SERMI,[92] H. Ahmad Amin, H. YasinAmin serta H.M. Hasan Baseri adalah para aktivis Muhamadiyah, H. Mugeni Marwan adalah pengurus NU. Dengan demikian, jika melihat latar belakang para ulama dan guru agama yang bergabung di PGSI, maka dapat dinyatakan bahwa para ulama dan guru agama para pendiri SMIP-1946 ini adalah merupakan orang orang berfikiran modern, terbuka dan moderat serta sangat mengutamakan kerjasama dan persatuan yang diikat dalam satu cita-cita dan perjuangan yang sama.

[91]Asy`ari, “Sejarah Singkat SMIP 1946.” p. 1
[92]Maksum, “Musyawaratutthalibin .”

Tanpa mengecilkan peran pendiri yang yang lain, dua sosok utama yang menjadi pemikir dan penggerak lahirnya gagasan berdirinya SMIP-1946 ini ialah H. Khatib Syarbaini Yasir dan H. M. Hanafie Gobit. Yang pertama sebagai Ketua PGSI dan sekaligus sebagai Kepala SMIP-1946 yang pertama (1946-1951) dan yang kedua sebagai guru dan Ketua Yayasan pertama yang menaungi SMIP-1946 ini. Untuk itu dua sosok ulama ini dapat dipastikan lebih besar kontribusi pemikiran dan kiprahnya dalam lahirnya SMIP-1946 ini dengan segenap gagasannya. Dengan demikian, apa yang menjadi karakter dari dua tokoh inilah yang mencerminkan gagasan yang ada pada SMIP-1946 ini.

1. H Khatib Syarbaini Yasir

Khatib Sarbaini Yasir adalah salah seorang guru agama Islam yang berasal dari Sumatera Barat. Beliau merupakadalah alumni "Normal Islam" Padang, sebuah lembaga pendidikan keguruan yang didirikan oleh Mahmud Yunus dan kawan-kawannya dari PGAI, yang dipimpin Abdulah Ahmad. Mahmud Yunus sendiri ditunjuk sebagai direkturnya. Normal Islam hanya menerima tamatan madrasah 7 tahun dan dimaksudkan untuk mendidik calon guru. Normal Islam mengajarkan ilmu-ilmu agama, bahasa Arab serta kesusasteraannya, pengetahuan umum, ilmu mendidik/mengajar, ilmu jiwa, dan ilmu kesehatan. Mahmud Yunus berpendapat, "kalau di HIK para siswa dapat belajar berbagai macam ilmu pengatahuan dengan bahasa pengantar (*voertaal*) bahasa Belanda, maka di Normal Islam ini para siswa belajar ilmu-ilmu agama dan pengetahuan umum dengan pengantar bahasa Arab." Untuk mendukung penggunaaan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar di sekolah, Mahmud Yunus menggunakan buku *Durus al-Lughah al-Arabiyyah* 2 jilid yang dikarang ketika ia masih berada di Mesir. Di sini Mahmud Yunus membuat pembaruan metode mengajar bahasa Arab sehingga para siswa dapat menguasai bahasa Arab secara aktif. Madrasah ini juga madrasah yang pertama-tama memiliki laboratorium untuk ilmu fisika dan kimia.[93]

[93]Syeh Hawib Hamzah, "Pemikiran Mahmud Yunus Dalam Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Dinamika Ilmu* 14, no. 1 (2014): 123–47, https://iain-samarinda.ac.id/ojs/index.php/dinamika_ilmu/article/view/18.

H. Khatib Sarbaini Yasir organisasi lokal Kalimantan *musyawaratuthalibin* diminta untuk mengajar dan mengembangkan pendidikan Islam di Daerah Banjar. Setibanyanya di Daerah Banjar beliau pertama kali mengajar di "Normal Islam" Rantau Kabupaten Tapin, sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan *Musyawaratutthalibin.*[94] Selanjutnya juga aktif berkiprah dan mengembangkan pendidikan Islam pada seluruh lembaga pendidikan yang dibina oleh *Musyawaratutthalibin*. Setelah pembubaran atau penonaktifan organisassi *Musyawaratutthalibin* atas kebijakan Pemerintahan Pendudukan Jepang tahun 1942 hingga berakhirnya masa pendudukan Jepang tersebut serta diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia tahun 1945,[95] beliau terus aktif sebagai seorang ulama dan pendidik, dan kemudian beliau mendirikan Persatuan Guru Sekolah Islam (PGSI) yang sekaligus sebagai pimpinan pertamanya. Melalui PGSI inilah beliau Bersama tokoh ulama lainnya mengagas pendrian SMIP-1946, dan sekaligus beliau sebagai pimpinan atau Kepala sekolah pertama, yakni periode 1946-1951.[96] Selain itu, beliau juga aktif dalam organisasi perjuangan kemerdekaan Kalimantan, yaitu sebagai pendiri dan pengurus Syarikat Muslimin Indonesia (SERMI), sebagai Ketua II.[97]

2. H M. Hanafie Gobit

Lahir di Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 11 Januari 1915. Latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh: *Inlandche School* (sekolah rakyat tingkat dasar) di Balikpapan, *Madrasah Diniyah Al-Ashriyyah* (Sekolah Arab) di Banjarmasin (1925-1927), pendidikan non formal dalam bentuk *kaji duduk* (halaqah) kepada Tuan Guru Haji Said Midad dari tahun 1925 sampai dengan tahun 1933 di Kampung Sungai Jingah. Pada tahun 1933 beliau pergi ke Mekkah untuk melanjutkan pendidikan pada *Madrasah Ash-Sholatiyah* di Mekkah selama enam setengah tahun (1933-1940) dengan mendapatkan ijazah setingkat *Al-Qismul 'Ali* dengan nomor: 2025, tertanggal 14 Rajab 1360 H. 1941 M. Selama di Mekkah, beliau juga aktif mempelajari ilmu-ilmu agama yang diselenggarakan pada Masjidil Haram. Pada tahun 1941 beliau pulang ke Banjarmasin dan mengabdi pada masyarakat sebagai tuan guru dan menggagas beridirnya Departemen Agama Kalimantan Selatan serta menjadi tenaga

[94]Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*, ed.. p. 54-57.
[95]M.Nur Maksum, "Musyawaratutthalibin , p. 78.
[96]Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*., p. 6.
[97]Dkk. M. Idwar Saleh, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, ed.dkk.. p. 116.

pengajar dalam berbagai lembaga pendidikan, baik umum maupun agama. Beliau juga aktif pada oragnisasi Persatuan Guru Sekolah Islam (PGSI) yang didirikan tahu 1945.

H.M. Hanafie gobit juga dapat dinyatakan sebagai ulama yang berpikiran terbuka untuk modernisasi, moderat dan kolaboratif. Hal itu dapat dilihat dari berbagai kegiatan dan organiasasi politik dan sosial keagaman serta jabatan pemerintahan yang beliau geluti. Di natara kegiatan yang beliau jalani selama kurun sebelum dan sesudah kemerdekaan sampai tahun 1950, selain aktif berdakwah dan mengasuh pengajian di Masjid Jami Banjarmasin dan seluruh pelosok, antara lain:

(1) Sebagai salah seorang pendiri dan aktivis oragnisasi sosial keagamaan lokal yang bernama *Musyawaratuthalibin* tahun 1931.,Organisasi ini dikenal memiliki karakter moderat dan mengutamakan ishlah dan dapat bekerjasama dengan berbagai pihak.
(2) Sebagai pengajar pada Sekolah Qadhi (*Kaikyo Gakko Ing*) yang berdiri pada masa pendudukan Jepang.[98]
(3) Mustasyar Kerapatan Qadhi Besar Banjarmasin tahun 1942-1944
(4) Wakil Qadhi Besar tahun 1942-1943, berdasarkan Surat Keputusan Borneo Menseibu Tjokan, tertanggal 20-11-1942.
(5) Ketua Muda Kantor Jam'iyah Islamiyah *Borneo Kaikjo Kjokai* Banjarmasin tahun 1944-1947
(6) Anggota *Sikai Gun* (Dewan Kota) pada masa pendudukan Jepang.
(7) Satu-satunya orang Indonesia yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh mata pelajaran Budi Pekerti pada Pada masa Nica, pertama kali didirikan jenis sekolah sekolah guru yang didirikan oleh NICA dengan nama *Kweekschool Nieuw Stijl* bertempat di Banjarmasin pada tahun 1947.
(8) Sebagai pendiri dan pengelola pembangunan serta aktif sebagai pengajar. Beliau adalah sebagai Ketua Yayasan, yaitu "Yayasan Kesejahteraan Madrasah Menengah" yang membangun SMIP-1946 di masa awal beridirinya hingga tahun 1983.

[98] Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*.

(9) Bersama dengan beberapa tokoh pergerakan, antara lain: A. Sinaga, Fajar Sidik, Raden Sya'ban, dan Engku Rasyid pada tahun 1946 mendirikan sebuah sekolah tingkat atas yang disebut Sekolah Menengah Tinggi (SMT).[99]

Setelah tahun 1950 beliau tetap aktif dalam dalam beberpa kegiatan sosial dan orgnaisasi sosial keagamaan dan juga politik, di antaranya:

1) Sebagai ulama yang diberi mandate mendirikan Departemen Agama di Kalimantan serta menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kalimantan sejak tahun 1951 sampai dengan 1963.
2) Salah seorang penggagas beridrinya IAIN Antasari.
3) Wakil Ketua Majelis Ulama Daerah Kalimantan Selatan yang dibentuk oleh Pangdam X Lambung Mangkurat pada tahun 1982. Sebagai ketuanya ditunjuk KH. Salman Taib. Ia juga sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada tahun 1975. Ketika itu, Ketua MUI Pusat adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)
4) Anggota Komisi III MUI yang Membidangi Ukhuwah Islamiyah, berdasarkan hasil Keputusan Munas II MUI tahun 1980 di Jakarta.
5) Ketua Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) Cabang Kalimantan Selatan yang pertama.
6) Di bidang politik juga aktif berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan Kalimantan pada masa revolusi dan juga aktif dalam partai politik, yakni sebagai pengurus dan anggota SERMI, Parmusi, Masyumi dan terakhir PPP. Sempat menjadi anggota MPR Berbagai aktivitas dan jabatan yang beliau lakukan dan pegang tersebut mencerminkan karakter beliau yang sangat terbuka, moderat dan selalu tanggap dengan perubahan yang mendorong adanya modernisasi dlam setiap bidang yang digeluti.[100]

[99] Tim, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa*.
[100] Tim.

Selain kedua tokoh sentral dalam pendirian SMIP-1946 ini terdapat juga beberapa tokoh lain yang ikut serta meberikan pemikiran lahirnya gagasan model SMIP-1946, yaitu:

(1) H. Hasan Mugeni Marwan.

Beliau Lahir di Desa Banua Anyar Banjarmasin pada tahun 1905. Latar belakang pendidikan beliau adalah Al-Azhar Mesir dengan bidang keahlian Tafsir dan Seni Baca al-Qur`an. Beliau selain ikut memprakarssai beridinya SMIP-1946 ini juga pernah menjabat sebagai Pimpinan SMIP-1946 periode 1951-1954. Aktif sebagai pengurus NU dan pernah menjadi Qadi di Banjarmasin.

(2) H. Hasan Baseri

Lahir di Muara Teweh Kalimantan Tengah dan dibesarkan di Banjarmasin Daerah Banjar. Latar belakang pendidikan yang dilalui, Diniyah Awwaliyah Islamiyah, sekolah menengah pertama (*Vervolk School*) dan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah di Banjarmasin, Sekolah Guru Mu`alllimin di Yogyakarta

Selain itu ada beberapa ulama dan guru agama yang merupakan pengasuh dari Madrasah al-Ashriyah Pasar Lama Banjarmasin, seperti H.M. Yasin Amin, Abu Bakar Razy, H. Busera Qasim, H.Ahmad Amin yang dilibatkan dalam pendirian SMIP-1946 dan sebagai guru.

Jika dilihat dari biografi para ulama yang terlibat dalam lahirnya SMIP-1946 ini, umumnya mereka adalah para ulama yang berpikiran moderat, moderen, dan non sektarian. Meskipun jika dilihat dari latar belakang dan pengalaman mereka cukup beragam, ada yang berlatarbelakang pendidikan tradisional di dalam negeri dan luar negeri. Begitu juga dilihat dari aktivitas organisasi, mereka juga beragam, ada yang berkecimpung di organisasi Muhammadiyah, NU, dan SI, Permusi. Hal itu juga menunjukkan bahwa para ulama yang mendirikan sekolah ini adalah para ulama Banjar yang berpikiran dan memiliki sikaf terbuka atas perbedaan pikiran dan pandangan.

BAB IV

GAGASAN PENDIDIKAN ISLAM MODEL SMIP-1946 BANJARMASIN

A. Bentuk Pendidikan SMIP-1946 Masa awal Pendiriannya.

Gagasan pendirian lembaga pendidikan Islam dalam bentuk sekolah ini tidak hanya dalam bentuk Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP) saja, tetapi juga dalam bentuk Sekolah Menengah Islam Atas (SMIA) dan Sekolah Guru Pendidikan Islam (SPGAI). Hal itu sebagaimana terlihat dalam poto dokumentasi pembangunan sarana pendidikannya yang berlokasi di Jalan Masjid Jami Banjarmasin, sebagaimana gambar berikut:



Pembangunan gedung SMIP 1946 Jl. Masjid Surgi Mufti Banjarmasin.

Dipindai dengan CamScanner

Pada tahap awal, sesuai dengan realitas kebutuhan dan tuntutan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka pada tahun 1946 tersebut baru dapat diwujudkan adalah mendirikan SMIP. Akan tetapi semangat dan misi pendidikan SMIA dan SPGAI tetap menjadi perhatian dalam pendirin SMIP. Hal itu terbukti dalam gagasan kurikulum yang dipakai dalam SMIP-1946 sebagaimana dapat dilihat pada paparan berikutnya.

Ada beberapa gagasan penting yang perlu dikemukakan dalam pendirian SMIP-1946 ini, yaitu:

1. **Pemilihan Nama dan Tingkat "Sekolah Menengah Islam Pertama"**.

Gagasan pengambilan nama "Sekolah Menegah Islam Pertama" tentu bukanlah tanpa alasan dan pertimbangan yang mendasar oleh para penggagasnya. Pengambilan nama atau sebutan "sekolah menengah Islam pertama" ini sangat menarik untuk ditelusuri alasanya: Secara spesifik gagasan yang perlu ditelusuri atas pengambilan nama "sekolah Menegah Islam Pertama" ini adalah: Pertama, kenapa mengambil nama "sekolah Islam", bukan mengambil nama Madrasah atau "Arabis School", dan lainya sebagaimana banyak dipakai modernisasi pendidikan Islam dari awal abaad ke-20 hingga pertengahan atau mengambil nama seperti nama lembaga pendidikan sederajat yang dipakai oleh Pemerintah Kolonial Belanda, seperti, MULO (*Meer Ultgebreid Lager Onderwijs*), *Kweekschool* yang merupakan sekolah umum tingkat pertama yang dipakai oleh Pemerintah Jepang; Kedua, kenapa mengambil sekolah "Menengah Tingkat Pertama"

a. **Sebagai "Sekolah Islam".**

Penggunaan istilah "sekolah Islam" yang dipakai oleh SMIP-1946 pada saat itu (tahun 1946), dapat dinyatakan sebagai istilah yang baru untuk lembaga pendidikan Islam bahkan sekolah umum di Kalimantan. Belum ada organisasi Islam, seperti SI, Muhammadiyah, *Musyawaratutthalibin*, PPI, dan organisasi atau pengelola lembaga pendidikan Islam di Kalimantan yang menggunakan nama sekolahnya dengan nama "sekolah Islam" sebelum taun 1946. Bahkan, sebagaimana dikemukakan oleh Ramli Nawawi, dkk dalam bukunya 'Sejarah Pendidikan Dearah Kaliamantan Selatan', penggunaan nama SMP untuk sekolah menegah tingkat pertama baru ada sejak tahun 1950, setelah Indonesia memiliki pengakuan penuh oleh Pemerintah Belanda atas keperdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 agustus 1945. Nama SMP tersebut merupakan kelanjutan dari MULO pada jaman Pemerintahan Kolonial Belanda dan '*Hutsu Tjo Gakko'* jaman pendudukan Jepang di Banjarmasin yang kemudian menjadi SMP Negeri I sampai sekarang.[101] Hanya saja tentu kapasitasnya sedikit berbeda karena tamatan MOLO disamping dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi juga dapat diangkat menjadi guru Sekolah Rakyat.

[101]Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*., p. 102 dan 103.

Istilah atau nama "sekolah Islam" tentu diduga merupakan istilah yang diambil dari terjemahan "*school*" (Bahasa Inggeris), yang pernah dipakai oleh pembaharu pendidikan di masa awal abad ke-20 di Sumatera Barat dan Jawa, seperti "*Adabiyah School'* tahun 1909 oleh Haji Abdullah Ahmad, `*Madras School*` tahun 2010 oleh Syeck M. Umar Thaib di Batusangkar; `*Diniyah School*` tahun 1915 oleh Zainuddin Labai al-Yunusi di Batu Sangkar,[102] dan *Arabiche School* oleh K.H. Abdurrasyid di Amuntai.[103] Akan tetapi SMIP-1946 tidak menggunakan nama-nama sekolah Islam seperti itu alasannya tentu apa yang menjadi tujuan atau harapan serta muatan dari didirikannya SMIP-1946 sama sekali berbeda drngan yang yang dimiliki atau dilakukan oleh model-model sekolah Islam tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam catatan sejarah SMIP-1946 bahwa sekolah ini didirikan benar-benar digagas untuk mengintegrasikan secara penuh antara tujuan dan muatan sekolah umum (seperti MULO) dan sekolah Islam (Madrasah dan Arabic School), yang diistilahkan (50% umum dan 50% agama).[104] Dengan kata lain, sebagai sekolah Islam yang tidak hanya menjadikan muatan mata pelajaran umum sekedar sebagai sebuah suplimen dari pelajaran agama atau sebaliknya, sebagaimana banyak dilakukan banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam sebelumnya.

Istilah "sekolah Islam" yang dipakai oleh SMIP-1946 juga dimaksdukan untuk menyatakan atau menegaskan bahwa sekolah ini juga tidak sama dengan sekolah yang pernah dikembangkan oleh pemerintah Kolonial Belanda (baik pada masa ating maupun pada masa pemerintahan NICA dan pemerintahan Jepang, yaitu MULO dan *Hutsu Tjo Gakko'.* Oleh karena itu kedua nama itu tjuga idak dipakai. Walaupun pada saat berdirinya SMIP-1946 ini pemerintah Pemerintahn Belanda (NICA) Kembali melaksanakan pendidikan tingkat menengah pertama dengan nama MULO atas lembaga pendidikan yang sebelumnya dirubah ating oleh Pemerintah Pendudukan Jepang dengan nama *Hutsu Tjo Gakko'.* Hal yang juga menjadi alasan atas tidak dipakainya kedua nama sekolah tersebut (MULO dan *Hutsu Tjo* Gakko) karena lembaga tersebut milik penjajah, yang apabila dipakai dianggap kontra dengan salah satu alasan dan misi utama atas didirikannya SMIP-1946, yakni dalam rangka upaya perjuangan untuk melepaskan bangsa Indonesia, khususnya rakyat Daerah Banjar,

[102]Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*., p. 63.
[103]Malisi, "Modernization of Islamic Education in South Kalimantan (Socio-Historical Perspective of Normal Islam Amuntai)."
[104]Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*.

dari belenggu penjajahan melalui pencerdasan anak bangsa melalui jalur pendidikan Islam. Hal itu sebagaimana dikemukakan dalam buku "Lima Puluh Tahun "SMIP-1956", bahwa ating berdirinya SMIP-1946 ini adalah karena"… betapa pentingnya kehadiran lembaga pendidikan ini, baik ditinjauh dari segi tanggung jawab seorang muslim maupun dari segi perjuangan bangsa yang ingin membebaskan diri dari belenggu penjahan di kala itu."[105] Selain itu, adanya kesadara bahwa ada satu sikap yang dipegang tegus oleh masyarakat Daerah Banjar yang mayoritas beragama Islam adanya keengganan memasuki sekolah Belanda atau yang bernuansa Belanda, karena dianggap salah satu misi sekolah Belanda adalah untuk mengkristenkan anak-anak mereka.[106] Selain itu, pengambilan nama "Sekolah Islam" ini juga mencerminkan ke-Indonesia-annya dan sebagai wujud semangat perjuangan dan pengakuan akan kemerdekaan Indonesia yakni dengan menggunakan bahasa persatuan "Bahasa Indonesia" sebagaimana salah satu isi sumpah pemuda. Alasan terakhir ini tentu sangat penting, sebab ditakutkan jika mengambil nama sekolah Belanda atau Jepang, akan terjadi penolakan dari masyarakat Daerah di Banjar.

b. Sebagai Sekolah "Menengah Tingkat Pertama".

Meskipun sekolah ini merupakan sekolah menengah tingkat pertama, namun realitasnya model SMIP-1946, ketika masa awal berdirinya, memiliki keunikan tersendiri yang membedakan dengan madrasah tsanawiyah atau *wostho school* yang dipakai oleh organisasi Islam sebelumnya. SMIP-1946 ini juga berbeda dengan *MULO* (sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda atau *Hutsu Tjo Gakko'* sekolah menengah tingkat pertama yang dikelola oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. Baik *MOLU* ataupun *Hutsu Tjo Gakko'* memberlakukan waktu belajar selama 3 tahun dan diperuntukkan untuk dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu tingkat sekolah menengah atas. Berbeda dengan kedua lembaga itu, SMIP-1946 memberlakukan masa belajar 3 tahun untuk siswa yang berasal dari latar belakang pendidikan madrasah ibtidaiyah dan yang sederajat (kelas B) dan waktu belajar semala 5 tahun untuk siswa yang berlatar belakang Sekolah Rakyat (SR sekarang setingkat SD).[107] Selain itu siswanya juga dipersiapkan untuk dapat mengikuti ujian persamaan untuk menjadi guru Agama Islam (PGA

[105]Penyusun.
[106]Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*., p. 50.
[107]Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*., p.5.

4 tahun) atau untuk melanjutkan k ejenjang PGA 6 tahun. Lulusan SMIP-1946 dapat juga mengikuti ujian persamaan untuk memasuki sekolah menengah tingkat atas. Selain itu, lulusan SMIP-1946 juga dapat mengikuti Sekolah Persiapan Institut Agama islam Negeri (SP IAIN) selama 2 tahun untuk kemudian dapat melanjtkan ke IAIN, melanjutkan ke Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA). Sebagai contoh Dr. H. Alfani Daud, setelah menamatkan SMIP-1946 tahun 1952 beliau melanjutkan ke SGHA Jurusan Hakim Agama, kemudian melanjutkan ke IAIN Sunan Kalijagapada dan tamat tahun 1956.[108]

Pilihan model sekolah menegah tingkat pertama dengan model SMIP-1946 yang setara dengan madrasah Tsanawiyah (Sekolah Islam), MULO (sekolah Belanda) atau *Hutsu Tjo Gakko* (sekolah Jepang) tersebut tentu didasari oleh pemikiran yang bukan saja pragmatis tetapi juga konsepsional. Secara pragmatis pilihan tersebut beralasan karena disadari banyak sekali masyarakat yang lulusan sekolah setingkan madrasah Ibtidaiyah dan sejenisnya (sekolah Islam) atau *Verfolksschool* dan *Inlandse School Door Tweedeclate* (sekolah-sekolah untuk pribumi dari Pemerintah Kolonial Belanda), atau *Djokyo Kogakko* (sekolah tingkat dasar 6 tahun masa Pendudukan Jepang) yang tidak dapat meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi berikutnya, baik karena tertutupnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya atau minimnya sekolah tingkat lanjutan pertama yang dimiliki Islam. Apalagi di di era pendudukan Jepang, semua sekolah Islam harus dijalankan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang. Akibat dari kondisi tersebut menyebabkan sedikit sekali rakyat bumiputera yang berpendidikan setingkat sekolah menengah pertama dan di sisilain banyak sekali lulusan madrasah ibtidayah atau sekolah islam lainnya serta lulusan *volkschool* dan *Vervogschool* yang tidak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannnya. Menurut catatan Ramli Nawawi, dkk., berdasarkan data yang terdapat dalam Daftar Induk Sekolah (*stamboek*) peninggalan MULO Banjarmasin, yang masih tersimpan di sekolah lanjutan yang menggantikan (SMPN 1 Banjarmasin), bahwa orang Indonesia yang berkesempatan untuk sekolah di *MULO* hanya kurang lebih 5% dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur pada saat itu.[109]

[108]Tim, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa*., p. 361.
[109]Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*., p. 43.

Selain alasan di atas, gagasan untuk mendirikan sekolah setingkat menengah pertama model SMIP-1946, sebagaimana dalam buku "Lima Puluh Tahun SMIP-1946, bahwa pada waktu itu belum ada yang dikembangkan dengan nama sekolah tingkat menengah pertama yang dikembangkan atau didirikan oleh kalangan Islam. Khusus dengan model sekolah tingkat menengah pertama yang memadukan mata pelajaran umum yang seimbang seperti yang dikembangkan oleh SMIP-1946.[110] Dalam catatan sejarah organisasi Islam yang menyelenggarakan pendidikan tingkat menengah pertama yang berorientasi pada pembinaan pendidikan agama dengan sedikit memasukkan ilmu pengetahuan umum sebagai suplimen, tercatat:

1) Muhammadiyah di Daerah Banjar, selain membangun sekolah menengah tangka pertama umum ala Belanda juga sempat mendirikan sekolah Islam tingkat pertama yang diberi nama *Wostho School* dengan lama belajar 3 tahun yang diperuntukan untuk mencetak guru di lingkungan sekolah Muhammadiyah. Selain itu Muhammadiyah mendirikan sekolah guru yang diberi nama Mualllimin, yang belakang setara dengan PGA 6 tahun.
2) Musyawaratuttalibin juga sempat mendirikan madrasah tsanawiyah yang berorientasi pada pembinaan pengetahuan keagamaan dengan sedikit memasukkan ilmu pengetahuan umum. Sebelum bubar tahun 1942 yang jumlah muridnya lebih dari 500 orang.
3) Persatuan Perguruan Islam (PPI) sejak tahun 1935 mendirikan madrasah Tsanawiyah sebanyak 6 buah, juga lebih berorientasi pada pengetahuan keagamaan, dengan memberikan sedikit suplimen ilmu pengetahuan umum.
4) Taman siswa mendirikan lembaga pendidikan setingkat menengah dengan nama Taman deawasa (setingkat SMP) yang bersifat umum.
5) Madrasah Darussalam Martapura juga mendirikan madrasah tsanawiyah yang sudah tentu lebih berorintasi pada pengetahuan keagamaan.[111]

Sebagai akibat dari banyaknya tamatan sekolah tingkat dasar yang tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan lembaga dalam bentuk sekolah menengah

[110]Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946.*, p. 4.
[111]Ramli Nawawi. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*., p. 49-89.

tingkat pertama yang memadukan pelajaran agama dan umum serta besarnya animo mereka ditandai dengan sambutan masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah ini yang luar biasa. Mereka ating dari berbagai pelosok, tidak saja berasal dari Banjarmasin, tetapi berasal dari seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan (Martapura, Rantau, Kandangan, Barabai, Tanjung, Kota baru) dan juga ada yang berasal dari Kalimantan Tengah dan Timur. Pada pendaftara pertama tahun 1946-1949, dapat dilihat sebagai berikut:

JUMLAH SISWA PENDAFTAR SMIP-1946 DARI TAHUN 1946-1949

NO	TAHUN	JUMLAH PENDAFTAR
1.	1946	168 orang Siswa Baru
2.	1947	76 orang siswa
3.	1948	159 orang siswa
4.	1949	115 ang siswa baru

Dikutif dari: Lima Pulih Tahun SMIP-1946.[112]

Selain itu, siswa yang mendaftar menjadi siswa SMIP 1946, bukan saja berasal dari lulusan madrasah ibtidaiyah dan sekolah Islam lainnya serta pesantren, tetapi juga dari lulusan sekolah umum, seperti *Volkschool* dan *Vervolgschool*. Selain itu, yang mendaftar juga bukan saja lulusan baru (*presh graduate*) tetapi banyak juga lulusan yang sudah lama (berusia tua). Untuk itulah, kemudian pengelola SMIP-1946 untuk siswa tahun pertama melakukan kebijakan pembagian lama belajar yang berbeda yang digolongkan menjadi kelas A dan kelas B. Kelas B adalah siswa yang berasal dari sekolah Islam dengan masa belajar selama 3 tahun, sedangkan kelas A adalah siswa yang berasal dari sekolah umum, dengan lama belajar 5 tahun.[113]

B. Gagasan Tentang Visi, Misi, Tujuan SMIP-1946

Gagasan pendirian SMIP-1946 tentu memliliki visi, misi dan tujuan yang secara sadar dipilih oleh para penggagasnya. Gambaran visi, misi, dan tujuan pendirian SMIP-1946 tersebut dpt digambarkan sebagai berikut:

[112]Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946.*, p. Lampiran X.
[113]Penyusun., p. 3.

1. Visi dan Misi SMIP-1946

Sejatinya tidak ada visi, misi yang tertulis dari SMIP-1946 ini, tetapi dari berbagai latar belakang dan motivasi didirikannya SMIP-1946 ini dapat dibutiri apa yang menjadi visi dan misi SMIP-1946 ini, sebagai berikut:

a. Visi SMIP-1946

SMIP-1946 tentu didirikan oleh para penggagasnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan pragmatis dalam rangka menyambut dan mengisi kemerdekaan Indosenia yang baru diproklamasikan 17 Agustus 1945, tetapi juga dimaksudkan untuk menjadikan SMIP-1946 sebagai lembaga pendidikan Islam yang dapat mencerdaskan masyarakat baik dalam pengetahuan agama dan sekaligus pengetahuan umum, serta menjadi lembaga pendidikan yang dapat melayani kebutuhan pendidikan masyarakat tanpa memandang perbedaan.[114] Hal itu, sebagaimana dikemukakan dalam buku sejarah SMIP-1946, yang disebut dengan keistemewaan pendirian SMIP-1946 ini, yaitu:

1) SMIP didirikan dalam rangka merealisasikan misi pedidikan Islam untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia menuju kehidupan akhirat yang langgeng;
2) SMIP didirikan juga dimaksudkan untuk mengisi kemerdekaan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini antara lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
3) SMIP tidak berpandangan sektarian dalam kerukunan hidup beragama. Dalam mengembangkan sumber daya manusia SMIP tidak membedabedakan aliran atau golongan yang ada dalam masyarakat Islam.
4) SMIP sejak awal berdirinya tidak menyajikan kurikulum yang sempit. Kurikulum yang disajikan dalam kurikulum yang memadukan antara aspek=aspek pendidikan keagamaan dan aspek-aspek pendidikan umum yang sangat diperlukan untuk menjawaab ytantangan kemajuan zaman dalam kehidupan yang selalu bergerak dan berkembang.[115]

[114]Penyusun., p. 1.
[115]Penyusun., p. 2.

b. Misi SMIP-1946

Berdasarkan visi SMIP=1946 yang luas dan jangka Panjang tersebut dan berdasarkan apa yang menjadi latar belakang dan motivasi beririnya, dapat dirumuskan beberapa misi SMIP-1946, sebagai berikut:

1) Sebagai wadah pencerdasan umat untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang pendidikan, utamanya dalam bidang pendidikan umum dan tetap memiliki basis pengetahuan agama yang kuat.
2) Sebagai lembaga pendidikan Islam tingkat pertama yang dapat memebrikan pelayan kepada semua umat, tanpa dibatasi oleh sekat paham, organisasi, dan kelompok. Sebagaimana dinyatakan bahwa SMIP-1946 dibangun untuk semua golongan dengan tidak membeda-bedakan aliran dan paham keagamaan ada dalam masyarakat Islam.
3) Sebagai lembaga pendidikan yang juga dapat menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang amat dibutuhkan oleh masyarakat Islam pasca kemerdekaan Indonesia.
4) Sebagai lembaga pendidikan yang mengemban tugas untuk membina para perjuangan kemerdekaan Kalimantan dari Pendudukan NICA. Hal itu sebagaimana yang diperlihatkan oleh putera-puteri asuhan SMIP di kala itu dalam melibatkan diri dalam gerakan perjuangan bersenjata merebut kemerdekaan di daerah. Mereka tercatat sebagai anggota kesatuan gerilia yang mereka namakan sendiri dengar sebutan AKSI (Angkatar Kesatuan Siswa Indonesia) yang tergabung dalarn ALRI Divisi IV. Organisasi ini adalah satu-satunya kesatuan gerilia pelajar di daerah ini yang paling aktif beroperasi dan juga satu-satunya yang terbesar serta terorganisir dengan rapi. Seluruh pimpinan dan anggota teras yang dikerahkan dalam kegiatan operasi dilapangan adalah seluruhnya terdiri dari pelajar SMIP di kala itu. [116]

[116]Asy`ari, “Sejarah Singkat SMIP 1946.”

2. Tujuan SMIP-1946

Tujuan umum berdirinya SMIP-1946 adalah “untuk menciptakan manusia muslim yang benar-benar dapat menjadikan dirinya sebagai hamba Allah sekaligus juga hamba masyarakat” SMIP-1946 diarahkan untuk dapat menciptakan lulusan yang tidak hanya menjadi puta-puteri yang cerdas dan terampil, tetapi juga bertaqwa, berbudi pekerti luhur serta berdedikasi tinggi terhadap nusa, bangsa dan agama.

Secara khusus tujuan SMIP-1946 adalah menjadikan lulusannya:

a. menguasai pengetahuan agama dan juga pengetahuan umum secara seimbang
b. Memiliki jiwa perjuangan dan nasionalisme
c. Memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat yang kuat dan tulus.
d. Memiliki ketrampilan berdakwah dan mendidik.[117]

Jika dilihat tujuan di atas, tentu menarik untuk dicermati, sebab tujuan SMIP-1946 tersebut jika dibandingkan dengan tujuan sekolah menengah tingkat pertama sekarang sangat berbeda. Tentu hal semacam itu bisa dipahami, karena secara pragmatis hal semacam itu untuk saat itu sangat diperlukan. Ada kebutuhan penguasaan pengetahuan umum dengan tetap memeprtahankan kualitas pengetahuan agama, ada kebutuhan membangun patriotisme untuk mempertahankan kemerdekaan, dan ada kebutuhan tenaga pendakwah dan pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat dan untuk mememenuhi kebutuhan tenaga pendidikan yang sangat kurang bagi lembaga pendidikan Islam pada saat itu.

C. Gagasan Muatan Kurikulum “SMIP-1946”

Jika dicermati kurikulum yang disajikan oleh SMIP-1946 pada masa awal perdirinya ada beberapa gagasan yang menarik untuk dicermati, yakni:

1. Integrasri Mata Pelajaran Agama dan Umum yang Seimbang

Sekolah ini dapat dinyatakan sebagai lembaga pendidikan Islam moderen pertama untuk sekolah menengah tingkat pertama (SMP) yang dikembangkan di

[117]Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*., p. 5.

Daerah Banjar, yang menggabungkan mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama secara seimbang (50% : 50%), yang sekarang dikenal dengan istilah Sekolah Menengah Islam Terpadu.

Diistilahkan 50% mata pelajarn umum dan 50% agama, Akan tetapi istilah itu hanya sebagai sebuah gambaran saja bahwa SMIP-1946 pendiriannya didaasarkan atas upaya untuk memadukan model pendidikan umum (sekolah ala Belanda) dan model pendidikan Islam (madrasah). Jika dilihat dari struktur mata pelajaran yang ada pada kurikulum pada masa awal pendiriannya, terdapat sebanyak 33 mata pelajaran, yang terdiri dari 19 mata epalajaran keislaman dan 14 mata pelajaran umum, sebagai berikut:

DAFTAR MATA PELAJARAN SMIP-1946 [118]

No	MATA PELAJARAN KEISLAMAN	No.	MATA PELSJARAN UMUM
1.	Al Qur`an/Tajwid	1.	Bahasa Indonesia
2.	Tafsir/Tarjamah	2.	Bahasa Inggris
3.	Hadist	3.	Berhitung
4.	Musthalah	4.	Berhitung Dagang
5.	Fiqh	5.	Aljabar
6.	Ushul Fiqh	6.	Ilmu alam
7.	Tauhid	7.	Ilmu Bumi
8.	Tarikh	8.	Ilmu Hewan/Tumbuhan
9.	Imla	9.	Ilmu Kesehatan
10.	Insya	10.	Sejarah Indonesia
11.	Qawaid	11.	Sejarah Umum
12.	Balaghah	12.	Tata Negara
13.	Muthala`ah	13.	Menggambar
14.	Mahfuzhat	14.	Ilmu Nafs/Ilmu Jiwa
15.	Adabul Lughah		
16.	Adyan		
17.	Tarbiyah		
18.	Faraidh		
19.	Akhlak		

Jika dicermati gagasan tentang modernisasi muatan kurikulum pada SMIP-1946 di atas, ada beberapa gagasan yang bisa dibutiri:

[118]Penyusun., p. 21.

1) Memasukkan muatan mata pelajaran umum dan agama secara seimbang 50%:50% yang dilakukan oleh para pengagasanya pada SMIP-1946 ini merupakan sebuah gagasan baru pada saat itu. Gagasan semacam ini secara serius dilakukan dalam modernisasi pendidikan Islam (khususnya madrasah) ialah ketika dikeluarkannya SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri) pada tahun 1975, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah, yang kemudian dikuatkan dengan SKB 2 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudaayaan dan Menteri Agama) tentang Penerapan Kurikulum mata pelajatrann umum pada madrasah. Inti dari dua kebijakan tersebut adalah sebagai upaya peningkatan kualitas atau mutu pendidikan umum pada madrasah dengan memasukkan atau mengajarkan seluruh mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah umum. Kebaruan gagasan tersebut juga dapat ditelusuri pada gagasan modernisaasi muatan kurikulum yang ada pada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Daerah Banjar sebelumnya, sejak masa pemerintah kolonial Belanda dan pemerintahan pendudukan Jepang, sebagaimana diuraikan pada bab tentang latar belakang lahirnya gagasan SMIP-946.
2) Jenis mata pelajaran agama diambil dari muatan yang lazim dianggap diperlukan untuk membina pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagaimana yang lazim terdapat dalam kurikulum madrasah atau lembaga pendidikan Islam lainnya yang berkembang pada saat itu, yang memuat ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu alat (kebahasaan).
3) Muatan mata pelajaran umum dimodifikasi dari muatan kurikulum seperti yang diajarkan pada MULO. Kurikulum MULO pada saat itu terdiri dari: 1. Membaca; 2. Bahasa Belanda; 3. Menulis (Okasional); 4. Berhitung dan Matematika; 5. Sejarah (Belanda dan Jajahan); 6. Sejarah (Dunia); 7. Geografi; 8. Ilmu Alam; 7. Bahasa Perancis; 8. Bahasa Inggris; 9. Bahasa Jerman; dan 10. Menggambar. [119]

2. Integrasi Ilmu Pengetahuan

Pembaharu pendidikan Islam yang dilakukan di dunia Islam di samping mendatangkan kemajuan masyarakat muslim, ternyata tidak sepenuhnya mampu

[119]S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)., p. 124.

menyelesaikan persoalan untuk mengejar ketertinggalan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan memunculkan persoalan baru di berbagai negara Islam, yakni di satu sisi munculnya golongan yang berpaham sekular dan pada sisi lain muncul pula golongan yang makin berpegang kuat pada paham ortodok. Munculnya dua golongan paham inilah yang pada gilirannya memperluas dan mempertajam persoalan dikotomi dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Munculnya dua golongan yang berseberangan itu, sebagaimana dinyatakan oleh Rahman (1982) adalah sebagai akibat paham sekularisasi yang diperkenalkan sejak abad renaisans yang tumbuh subur di Barat. Paham yang memisahkan antara urusan dunia dengan agama itu selanjutnya diadopsi, baik secara sadar ataupun tidak sadar oleh tokoh pembaharu Islam, utamanya oleh mereka yang pernah mengenyam pendidikan di Barat. Dampak yang dialami oleh dunia pendidikan Islam ialah munculnya pandangan yang disebut dualisme pendidikan dan pengetahuan, yaitu pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.[120] Upaya penyelesaian persoalan kurikulum dikotomik tersebut sesung-guhnya telah dilakukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahman (1982) atas dasar pengamatannya terhadap konsep dan praktek pendidikan di berbagai negara Islam, secara garis besar ada dua cara yang dilakukan: *Pertama*, dengan menerima ilmu pengetahuan (sains) modern yang sekuler sebagaimana telah berkembang secara umum di Barat dan dicoba untuk "mengislamkannya" dengan cara mengisinya dengan konsep-konsep tertentu dari Islam. *Kedua,* dengan cara menggabungkan atau memadukan ilmu pengetahuan modern dengan ilmu pengetahuan keislaman yang diberikan secara bersama-sama di suatu lembaga pendidikan Islam.[121]

Upaya integrasi bentuk kedua inilah yang dilakukan oleh SMIP-1946. Dipilihnya model ini, pertama tentu karena model integrasi tersebut lebih mudah dilakukan, walaupun di kalangan masyarakat dan ulama tradisional yang radikal masih sering dipersoalkan bahkan ditolak. Penolakan tersebut tentu disebabkan berbagai alasan, seperti dianggap sebagai upaya mengikuti orang Belanda yang notabene dianggap kapir.

[120] Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 2017)., p. 130-131.
[121]Rahman., p. 130-131.

Terlepas dari kontropersi tersebut, yang jelas gagasan dan upaya yang dilakukan dalam bentuk integrasi mata pelajaran umum yang utuh ke dalam kurikulum pendidikan Islam ini adalah merupakan terobosan yang bisa dianggap baru di daerah Banjar pada saat itu. Bahkan pihak pemerintahpun belum pernah melakukannya. Sebab sebagaimana tercatat dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia baru pertama kali memberlakukan kurikulum sendiri pada tahun 1947 yang disebut *"Rentjana Peladjaran 1947"*. Hal itupun bentuknya hanya mengalihkan model pendidikan yang dilakukan dalam lembaga pendidikan Belanda dan Jepang.

3. **Persiapan kompetensi sebagai Pendidik**

Kurikulum SMIP-1946 juga memasukkan mata pelajaran ilmu pendidikan, yaitu "Tarbiyah (ilmu pendidikan)" dan "ilmu nafs/ilmu jiwa." Hal ini dapat dipahami bahwa pendirian SMIP-1946 ini oleh para pengagasnya dimaksudkan bukan sekedar sebagai sebuah sekolah lanjutan tingkat pertama yang setara dengan MULO atau tingkat madrasah tsanawiyah, tetapi dimaksudkan juga sebagai sebuah upaya untuk menjadikan lulusannya memiliki kemampuan untuk mengajar atau sebagai pendidik. Hal ini tentu berdasarkan kesadaran penuh bahwa dalam di kalangan pendidikan Islam memiliki kekurangan tenaga pendidikan, lebih-lebih dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia, yang sudah barang tentu memerlukan tenaga pendidikan yang banyak. Hal ini dikuatkan dengan perubahan kurikulum kemudian setelah tahun 1952 lama pendidikan SMIP-1946 menjadi 4 tahun, sehingga lulusannya dapat mengikuti ujian persamaan PGA 4 Tahun di samping mendapatkan ijazah tingkat madrasah tsanawiyah dan SMP. [122]

4. **Integrasi Pengetahuan dan Nilai Kebangsaan**

Dimasukkannya mata pelajaran "Tata Negara", "Sejarah Indonesia" dan "Bahasa Indonesia" sebagai ganti dari mata pelajaran Sejarah (Belanda dan Jajahan) dan Bahasa Belanda (yang menggantikan sejarah Belanda sebagaimana dalam kurikulum MULO, menunjukkan bahwa ada semangat perjuangan dan nasionalisme

[122]Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*.

yang ingin ditanamkan dalam kurikulum ini. Hal ini sejalan dengan motivasi yang menjadi latar belakang berdirinya SMIP-1946 ini, sebagaimana dintulis dalam buku sejarah SMIP-1946, sebagai berikut:

> SMIP lahir di tengah-tengah perjuangan bangsa, khususnya di Daerah Banjar, yang sedang bergelora untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustusn1945. Kesadaran untuk berbangsa dan bernegara yang merdeka serta Hasrat ingin lepas dari belenggu penjajahan adalah salah satu latar belakang utama yang mendukung bangkitnya semangat pengabdian yang tinggi dari para pendirinya, yang ingin mendarmabaktikan diri merea dalam usaha perjuangan untuk mncerdaskan kehidupan bangsa yang mereka kaitkan dengan ibadaah kepada Allah SWT.[123]

Jika dilihat dari materi pelajaran yang ada pada kurikulum SMIP-1946 di atas dapat disebutkan ada mata pelajaran Tata Negara, Sejarah Indonesia dan Bahasa Indonesia. Mata-mata pelajaran ini berisikan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila.

Ide integrasi nilai dan semangat kebangsaan ke dalam kurikulum ini dilihat dari semangat diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan semangat untuk kemerdekaan Kaliamantan menjadi sangat penting. Meskipun secara politis kurikulum pendidikan di Indonesia baru dikeluarkan secara resmi pada tahun 1947 sebagai ganti fari kurikulum model sekolah Belandan dan Jepang, yang disebut dengan "rencana pelajaran". **[124]** Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gagasan memasukkan materi pelajaran yang bersifat nasionalisme atau kewarganegaraan ini telah mendahulu apa yang dirumuskan dalam kurikulum nasional.

5. **Wawasan Global**

Gagasan global dalam pendirian SMIP-1946 ini juga mendapat perhatikan yang cukup baik, yakni dengan memasukkan mata pelajaran "Bahasa Inggeris" di samping Bahasa Arab yang merupakan Bahasa global, ditambah dengan mata peelajaran "Sejarah Umum". Hal ini tentu muncul dari sebuah kesadaran dari para

[123]Penyusun., p. 15.

[124]Maimuna Ritonga, "Politik Dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Hingga Masa Reformasi," *Bina Gogik* 5, no. 2 (2018): 1–15.

penggagasnya agar lulusannya dapat berkiprah bukan saja di kancah lokal tetapi di kancah nasional dan global.

6. Muhadharah Sebagai Kegiatan ekstra Kurikuler

Selain muatan kurikulum dalam bentuk intra kurikuler di atas, SMIP-1946 sejak beririnya memiliki kurikulum yang berbentuk ko atau ekstra kurikuler berupa kegiatan praktik '*muhadharah'*, yakni pelajaran yang dilaksanakan di luar jam mengajar untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan untuk berceramah atau berdakwah di depan umum. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Hari Kamis (seminggu sekali). Bentuk kegiatan ko atau ekstra kurikuler dalam bentuk *muhadharah* ini sekaligus juga dijadikan sebagai sarana untuk membangun sikap dan semangat bagi para siswa untuk menjadi manusia muslim yang benar-benar dapat menjadikan dirinya sebagai hamba Allah sekaligus juga hamba masyarakat. Hal itu sebagaimana yang sering ditekankan oleh Khatib Syarbaini Yasir selalaku Direktur Pertama SMIP-1946, dalam acara *muhadharah,* dengan istilah: "jadilah budak Allah dan budak masyarakat".[125]

[125]Penyusun, *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*., p. 5.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Dari paparan pada bab-bab sebelumnya dapat disiplukan sebagai berikut:

1. Gagasan tersebut dimotori oleh para ulama dan guru agama yang tergabung dalam organisai PGSI. Mereka adalah para ulama dan guru agama yang berpikiran modern, moderat dan lebih mengutamakan kerja kolektif lintas organisasi dan paham keagamaan dalam membangun ummat.
2. Latar belakang lahirnya gagasan pendirian SMIP-1946 ini adalah:

    a. Semangat pengabdian kepada Allah SWT dan kepada mesyarakat daerah Banjar yang setelah penjajahan Belanda dan Jepang mengalami keterbatasan dalam akses pendidikan, khususnya untuk tingkatpendidikan menengah yang memadukan pengetahuan agama dan umum secara seimbang;
    b. Semangat yang menggebu dari para pendiri untuk mendapatkan kemerdekaan, khususnya kemerdekaan Kalimantan dari penjajahan kembali pemerintahan kolonial Belanda.
    c. Semangat untuk dapat mengisi kemerdekaan melalui pemberian kesempatan yang luas bagi rakyat Daerah Banjar untuik mengakses pendidikan yang berkualitas dan mudah serta tanpa diskrimitaif, tidak seperti pada jaman penjajahan Belandaa dan Jepang.

3. Gagasan modernisasi pendidikan Islam yang dilahirkan dengan model SMIP-1946, meliputi:
    a. Memilih nama lembaga pendidikan Islam ini dengan nama “sekolah Islam” bukan nama madrasah atau nama lainnya. Gagasan ini dimaksudkan untuk untuk memberi nuansa yang berbeda dari pendidikann Islam sebelumnya dan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan Jepang.

b. Memilih sekolah Islam tingkat pertama yang didasari oleh pandngan realistik akan kebutuhan masyarakat daerah Banjar, yang sebelumnya tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan setingkat menengah pertama yng disebabkan oleh diskriminasi dari pemerintah colonial Belanda dan Jepang bagi masyarakat Islam pribumi untuk melanjutkan pendidikan. Di samping itu adanya antusiame masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yanglebih berkualitas pada jenjang yang lebih tinggi. Selain itu pula pada kenyataannya di daerah Banjar pada waktu itu belum ada sekolah Islam yang memberikan ilmu pengetahuan agama dan umum yang seimbang.
c. Visi dan misi dan tujuan sekolah yang bukansekedar untuk mencerdaskan maasyarakat atau kehidupan bangsa, tetapi juga sebagai wahana untuk menggelorakan perjuangan merebut kemerdekaan dan semangat nasionalisme. Lulusan yang bukan saja menguasai ilmu pengetahuan umum tetapi juga tetap dapat mempertahankan penguasaan ilmu-ilmu keislaman yang baik.
d. Gagasan integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang (50 % agama dan 50% umum). Pengetahuan agama diambil dari kurikulum madrasah dan sejenisnya, sedangkan pengetahuan umum diambil dari kurikulum pendidikan masa Belanda sebelumnya.
e. Integrasi pengetahuan dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dalam kurikulum dan pembelajaran, yakni dengan memasukkan mata pelajaran, tata negara, sejarah umum (Indonesia) dan Bahasa Indonesia.
f. Menyiapkan siswa dengan ilmu kependidikan/keguruan dalam kurikulum dan pembelajaran, dengan masud para lulusannya dapat menjadi pendidik/guru pada sekolah-sekolah Islam di bawahnya. Hal ini dilakukan dengan memasukkan mata pelajaran psikologi Tarbiyah dan Ilmu Nafs.
g. Memprogramkan ekstra kurikuler dalam bentuk “muhadharah” yang digunakan untuk mempersiapkan lulusannya mampu menjadi pendakwah atau kemampuan publik speaking, sekaligus juga sebagai wahana untuk pembentukan semangat perjuangan merebut kemerdekaan bagi siswanya

B. Refleksi

Dari berbagai gagasan yang terdapat dalam pendirian SMIP-1946 di atas dapat dinyatakan bahwa gagasan yang laih pada era revolusi (1946-1949) tersebut sangat tepat dan brilyan pada kondisi dan masa itu. Di tengah-tengah perjuangan merebut dan mempertahan Kalimantan, gagasan ini sangat luar biasa, yang tidak banyak kesempatan bagi pihak lain untuk melahirkan sebuah lembaga pendidikan baru pada saat itu, khususnya di Kalimantan.

Gagasan modernisaasi pendidikan Islam model SMIP-1946 ini dapat dinyatakan berhasil, utamanya jika dilihat dari dari perkembangan para lulusannya. Setidaknya ada alumninya yang kelak menjadi Rektor IAIN Antasari, yakni Drs. H.M. Asy`ari, MA dan Dr. H. Alfani Daud, menjadi dosen pada berbagai perguruan tinggi, seperti: Prof. Dr. Badjuri Ali (dosen UNLAM), Drs. KH Adnani Iskandar , Drs. Harun Arrasyid, Drs. Syahrani Suhaily, Drs. H.M. Said Agil Assegaf, Drs. Malikul Adil, Drs. Ajidan Noor, Drs. Athailah Baderi, dan lain-lain. Tidak sedikit yang menjadi guru agama dan tokoh masyarakat dan pegawai di berbagai kementerian.

Beberapa gagasan seperti yang dilakukan pada SMIP-1946 ini jika dilihat pada konteks sekarang, tentu masih ada beberapa gagasan yang masih dianggap relevan dan perlu dijadikan perhatian untuk bisa dikembangkan kembali, seperti: (1) Gagasan menjadikan lembaga pendidikan yang non sektarian (bukan milik organisasi dan golongan) dan benar-benar independent; (2) gagasan integrasi pengetahuan agama dan umum dalam kurikulumnya, yang benar-benar seimbang dan tetap sama kuat, tidak berat sebelah atau tanggung; (3) Program *muhadharah*, yang saat ini di berbagai sekolah Islam sudah jarang dilakukan atau dilakukan secara intensif. Hal ini sangat penting untuk menjadikan siswa yang bukan saja berhasil mengusasi ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki keterampilan dan kompetensi untuk menyampaikannya kepada masyarakat; (4) Penanaman semangat cinta tanah air yang berlandaskan keyakinan ajaran agama yang kuat masih sangat relevan dan penting untuk siswa saat ini dan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian. *Muhammadiyah : The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, n.d.

Arif Subhan. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20*. Ke I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Asy`ari, H.Muhammad. "Sejarah Singkat SMIP 1946." *Seminar Dalam Rangka Ulang Tahun SMIP-1946*. Banjarmasin, 2014.

Benda, Harry J. *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit : Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Deliar Noer. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978.

Deliar Noor. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*. Edited by 8. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia.* Jakarta: Pustaka LP3ES., 2011.

Fogg, Kevin W. *Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia*. I. Jakarta: Noura Books PT Mizan Publika, 2020.

Gar, Gilbert Josephraghan. *A Guide to Historical Method*. Edited by Jean Delanglez. Michigan: he University of Michigan, 1957.

Gottschalk, Louis. *Understanding History : A Primer of Historical Method, Terjemahan Nugroho Notosusanto (Mengerti Sejarah : Pengantar Metode Sejarah)*. Second edi. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975.

Hamzah, Syeh Hawib. "Pemikiran Mahmud Yunus Dalam Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Dinamika Ilmu* 14, no. 1 (2014): 123–47. https://iain-samarinda.ac.id/ojs/index.php/dinamika_ilmu/article/view/18.

Husna. "KONTRIBUSI KELUARGA BESAR KH. HANAFIE GOBIT DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN ISLAM DI KOTA BANJARMASIN (Studi Tentang Penguatan Pendidikan Agama Islam Pada SMIP 1946, Pondok Pesantren Hunafaa Dan STAI Al Jami Banjarmasin)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI PROGRAM PASCA SARJANA PRODI PAI BANJARMASIN, 2020.

Ibrahim. *Inovasi Pendidikan (Pengantar Untuk Mmemahami Apa Dan Bagaimana Difusi Dan Implementasi Inovasi Pendidikan)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1988.

Idwar, Saleh. M. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Edited by Dkk. Sutrisno Kutoyo. *Penelitian Sejarah Dan Budaya, Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.* Banjarmasin: Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Selatan., 1978.

Indonesia, Tim CNN. “Sejarah Perjanjian Linggarjati: Isi Dan Hasil.” 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210608135009-31-651711/sejarah-perjanjian-linggarjati-isi-dan-hasil-perundingan.%0A.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Politik*. Edited by Imron Nasri. Yogyakarta: Volume Yogyakarta, 2018.

Maksum, M.Nur. “Musyawaratutthalibin , Organisasi Islam Lokal Terbesar Di Kalimantan Selatan.” *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2010): 203–28.

Malisi, M. Ali Sibram. “Modernization of Islamic Education in South Kalimantan (Socio-Historical Perspective of Normal Islam Amuntai).” *Ijtimā’iyya: Journal of Muslim Society Research* 2, no. 1 (2017): 43–66. https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v2i1.1051.

Mobini-kesheh, Natalie, and East Indies. “The Arab Periodicals of the Netherlands.” *Bijdragen* 152 (1996): 236–56.

Muhammad Jawaad Ridha. *Al Fikr Al Tarbawi Al-Islami Muqaddamah Fi Ushulihi Al-Ijtima’iyah Wa Al-’aqlaniyah*. T.Tp: Dar al Fikr al-Arabi, n.d.

Nakosten, Mehdi. History of Islam Origins of Western Education A.D. 800-1350 with an Introduction to Medival Muslim Education. Boulder, Colorado: The University of Colorado Press, 1964.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Indonesia Press, 1985.

———. *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Cetakan 9. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Nasution, Robby Darwis. “Kyai as a Agent of Change and Peacemaker in the Traditional Society.” *Sosiohumaniora*, 19, no. 2 (2017): 182.

Nasution, S. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Penyusun, Tim. *Lima Puluh Tahun "SMIP-1946*. Banjarmasin: Panitia HUT “SMIP-1946” Ke-50, 1996.

Qardhawi, Yusuf. *Dasar Pemikiran Hukum Islam: Taqlid Ijtihad*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 2017.

Ramayulis, Haji. *Sejarah Pendidikan Islam : Napaktilas Perubahan Konsep, Filsfat Dan Metodologi Dari Era Nabi SAW Samapi Ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia, 2011.

Ramli Nawawi. dkk. *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*. Edited by Ramli Nawawi. Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1992.

Ritonga, Maimuna. "Politik Dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Hingga Masa Reformasi." *Bina Gogik* 5, no. 2 (2018): 1–15.

Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah (Pendidikan Islam Dan Kurun Moderen)*. Jakarta: LP3ES, 1991.

Stibbe, D.G, J. Stroomberg, and D.G Stibbe. "Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie." s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1932.

Syaharuddin. *Orang Banjar (Menjadi Indonesia)Dinamika Organisaasi Islam Di Borneo Selatan 1912-1942*. Edited by M.Nazir S. Ketiga. Yogyakarta: Eja Publisher, 2017.

Syamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. 2nd ed. Yogyakarta: Ombak, 2007.

Tim, LP2M UIN Antasari dan MUI Propinsi Kalimantan Selatan. *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa*. Edited by Dkk. Dr. Wardani. *Antasari Press*. III. Banjarmasin: Antasari Press, 2018.

Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Wahid, Salahuddin. *Transformasi Pesantren Teboireng, Menjaga Tradisi DinTengah Tantangan*. 1st ed. Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Wajidi. *Nasionalisme Indonesia Di Kalimantan Selatan 1901-1942*. Banjarmasin: Pustaka Banua, 2007.

Yunus, Haji Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992.

Zuhairini. et.all. *Sejarah Pendidikan Islam*. 1st ed. Vol. 11. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.